



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN  
BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2015-2021**

Skripsi

Dibuat Oleh:

Mega Harun Utami  
022118215

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS PAKUAN  
BOGOR  
2023**



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN  
BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2015-2021**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program Studi  
Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA)



Ketua Program Studi Akuntansi  
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA.,  
CCSA., CA., CSEP., QIA., CFE., CGCAE)

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN  
BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2015-2021**


Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus  
Pada hari Senin, 29 Mei 2023

Mega Harun Utami  
022118215

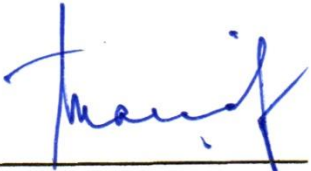
Disetujui

Ketua Penguji Sidang  
(Dr. Asep Alipudin, S.E, M.Ak, CSA)




---

Ketua Komisi Pembimbing  
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA.,  
CCSA., CA., CSEP., QIA., CFE., CGCAE)



---

Anggota Komisi Pembimbing  
(Abdul Kohar, S.E., M.Ak., CSR.P., CTC.P., CPSP)



---

**PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI SERTA  
PERLIMPAHAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI UNIVERSITAS PAKUAN**

---

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mega Harun Utami

NPM : 022118215

Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015-2021

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Mei 2023



Mega Harun Utami  
022118215

© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2023

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

*Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

## ABSTRAK

MEGA HARUN UTAMI. 022118215. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015-2021. Dibawah bimbingan : ARIEF TRI HARDYANTO dan ABDUL KOHAR. 2023.

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan pengelolaan keuangan secara baik dan benar untuk mempertahankan pelayanan yang diinginkan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah diantaranya pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal sebagai indikator yang menjadi tolak ukur dalam menilai kemandirian suatu daerah. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui apakah pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bandung tahun anggaran 2015-2021.

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan data sekunder berupa laporan keuangan yang bersumber dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Bandung dengan metode *purposive sampling*. Analisis yang digunakan yaitu statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi, regresi linier berganda dan uji hipotesis yang terdiri dari uji statistik t, uji statistik F dan uji koefisien determinasi menggunakan SPSS 26.

Hasil pengujian secara parsial dengan uji t mendapatkan hasil pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil Pengujian secara simultan dengan uji F yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, kinerja keuangan pemerintah daerah

## PRAKATA

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015-2021**. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor.

Penulis sadari bahwa penelitian ini tidak lepas dari segala kekurangan sehubungan dengan keterbatasan yang penulis miliki. Walaupun demikian bantuan dan dukungan dari berbagai pihak segalah kekurangan dan kesulitan dalam penulisan dapat teratasi. Dalam kesempatan ini penulis ingin sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan perlindungan serta nikmat kesehatan kepada penulis selama menyusun skripsi.
2. Alm. Bapak, ibu dan adik serta keluarga yang telah memberikan dukungan, dorongan semangat dan doa tiada henti untuk keberhasilan penulis
3. Bapak Prof. Dr. Rer. Pol. Ir. H. Didik Notosudjono, M. Sc. selaku Rektorat Universitas Pakuan Bogor yang telah memberikan kesempatan untuk penulis menuntut ilmu
4. Bapak Hendro Sasongko, Ak., MM., C. A. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor
5. Ibu Retno Martanti Endah Lestari. SE., M. Si., CMA, CAPM., CAP. Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor
6. Ibu Enok Rusmanah, SE., M. Acc. Selaku Wakil Dekan Bidang SDM dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor
7. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA., CFE., CGCAE. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor, sekaligus Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan banyak bimbingan serta pengetahuan kepada penulis
8. Bapak Dr. Asep Alipudin, SE., M.Ak. selaku Asisten Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor
9. Bapak Abdul Kohar, S.E., M.Ak., CSRP., CTCP., CPSP. Selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengetahuan kepada penulis

10. Seluruh Dosen di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor yang telah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi perkuliahan penulis
11. Seluruh Staf Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor
12. Mia Jauhariah, Shalaisya Labiba K., dan Risca Octavia yang telah memberikan ide dan membantu dalam pengerjaan penelitian ini
13. Teruntuk sahabat-sahabat dari SMK dan Kuliah yang tidak bisa disebutkan satu persatu
14. Semua teman-teman dari kelas C akuntansi dan organisasi HMA FEB Unpak angkatan 2018 yang banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran baru
15. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala dukungan doa dan bantuannya dalam penyusunan penelitian ini

Sebagai penutup, penulis mengharapkan semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bogor, Mei 2023

Penulis



Mega Harun Utami



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN DAN PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR HAK CIPTA</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah .....	5
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	5
1.2.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.3.1 Maksud Penelitian.....	6
1.3.2 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian .....	7
1.4.1 Kegunaan Praktis .....	7
1.4.2 Kegunaan Akademis.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>8</b>
2.1 Akuntansi Sektor Publik.....	8
2.1.1 Tujuan Akuntansi Sektor Publik .....	8
2.2 Keuangan Daerah .....	9
2.3 Pendapatan Asli Daerah .....	10
2.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	10
2.3.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah .....	11
2.4 Dana Perimbangan .....	13
2.4.1 Pengertian Dana Perimbangan .....	13
2.4.2 Jenis-Jenis Dana Perimbangan .....	14
2.5 Belanja Modal.....	15
2.5.1 Pengertian Belanja Modal.....	15

2.5.2	Sumber-Sumber Belanja Modal .....	15
2.6	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	17
2.6.1	Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	17
2.6.2	Indikator Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	17
2.6.3	Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	18
2.7	Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran.....	19
2.7.1	Penelitian Sebelumnya.....	19
2.7.2	Kerangka Pemikiran.....	26
2.8	Hipotesis Penelitian .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>		<b>29</b>
3.1	Jenis Penelitian .....	29
3.2	Objek, Unit Analisis Dan Lokasi Penelitian.....	29
3.3	Jenis Dan Sumber Data Penelitian.....	29
3.4	Operasional Variabel .....	29
3.5	Metode Penarikan Sampel .....	30
3.6	Metode Pengumpulan Data .....	31
3.7	Metode Pengolahan/Analisis Data .....	31
3.7.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	31
3.7.2	Uji Asumsi Klasik .....	32
3.7.3	Analisis Regresi Linier Berganda.....	33
3.7.4	Uji Hipotesis.....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>35</b>
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	35
4.1.1	Sejarah Dan Perkembangan Kota Bandung.....	35
4.1.2	Geografis Kota Bandung .....	36
4.1.3	Struktur Organisasi, Tugas Dan Wewenang.....	37
4.2	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung .....	42
4.2.1	Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bandung .....	42
4.2.2	Dana Perimbangan Pemerintah Daerah Kota Bandung .....	44
4.2.3	Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Bandung.....	45
4.2.4	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung.....	47
4.3	Analisis Data .....	48
4.3.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	48
4.3.2	Uji Asumsi Klasik .....	50

4.3.3	Regresi Linier Berganda.....	53
4.3.4	Uji Hipotesis .....	55
4.4	Pembahasan Dan Interpretasi Hasil Penelitian .....	57
4.4.1	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung .....	57
4.4.2	Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung .....	58
4.4.3	Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung .....	59
4.4.4	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung .....	59
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>61</b>
5.1	Simpulan.....	61
5.2	Saran.....	62
5.2.1	Kegunaan Praktis .....	62
5.2.2	Kegunaan Akademis.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>63</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>		<b>67</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>68</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung .....	2
Tabel 2.1	: Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah .....	18
Tabel 2.2	: Penelitian Sebelumnya .....	19
Tabel 3.1	: Operasional Variabel Penelitian .....	30
Tabel 4.1	: Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015-2021 .....	42
Tabel 4.2	: Rasio Kemampuan Keuangan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015-2021 .....	43
Tabel 4.3	: Dana Perimbangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015-2021 .....	44
Tabel 4.4	: Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015-2021 .....	44
Tabel 4.5	: Rasio Efektivitas Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2015-2021 .....	46
Tabel 4.6	: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung .....	47
Tabel 4.7	: Analisis Statistik Deskriptif .....	49
Tabel 4.8	: Hasil Uji Normalitas <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov</i> .....	51
Tabel 4.9	: Hasil Uji Multikolinieritas .....	51
Tabel 4.10	: Hasil Uji Glejser .....	52
Tabel 4.11	: Hasil Uji Run Test .....	53
Tabel 4.12	: Analisis Regresi Linier Berganda .....	54
Tabel 4.13	: Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T) .....	55
Tabel 4.14	: Hasil Uji Simultan (Uji F) .....	56
Tabel 4.15	: Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	57

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	: Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Kota Bandung Tahun Anggaran 2015-2021 .....	4
Gambar 2.1	: Kerangka Pemikiran .....	28
Gambar 4.1	: Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kota Bandung .....	37
Gambar 4.2	: Grafik Rasio Kemampuan Keuangan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015-2021 .....	43
Gambar 4.3	: Grafik Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015-2021 .....	45
Gambar 4.4	: Grafik Rasio Efektivitas Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015-2021 .....	46
Gambar 4.5	: Grafik Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015-2021 .....	48
Gambar 4.6	: Hasil Uji Normal Plot .....	50
Gambar 4.7	: Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplots.....	52

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015-2016	69
Lampiran 2	: Lanjutan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015-2016	70
Lampiran 3	: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bandung Tahun 2016-2017	71
Lampiran 4	: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bandung Tahun 2018	72
Lampiran 5	: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bandung Tahun 2019-2020	73
Lampiran 6	: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bandung Tahun 2020-2021	74
Lampiran 7	: Tabel Uji-T	75
Lampiran 8	: Tabel Uji-F	76

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan landasan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Otonomi daerah merupakan memberikan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah pada hakikatnya memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerahnya, baik yang berhubungan dengan sumber daya manusia, pendanaan ataupun kekayaan daerah serta memberikan pelayanan kepada masyarakat secara keseluruhan (Saleh, 2020). Adanya otonomi daerah diharapkan semakin mandiri dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan pembangunan ataupun didalam hal mengelola keuangan daerah.

Menurut Antari dan Sedana (2018) bahwa kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu kemampuan dalam meningkatkan penerimaan daerah serta membiayai pembangunan daerah dan pelayanan sosial masyarakat. Laporan realisasi APBD menjadi tolak ukur dalam pembangunan daerah, dalam hal ini pemerintah wajib membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dalam menjalankan roda pemerintahan kepada masyarakat, guna memenuhi asas transparansi (Jauhariah, 2022). Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Apabila pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka hal ini dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah itu sendiri.

Menurut Mahsun (2012) kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pengelolaan keuangan dari hasil suatu kegiatan, program ataupun kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah juga merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan pengelolaan keuangan secara baik dan benar untuk mempertahankan pelayanan yang diinginkan. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini akan diukur menggunakan rasio kemandirian yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya. Perhitungan rasio kemandirian merupakan perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan bantuan pemerintah pusat atau provinsi dan pinjaman. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan menggambarkan semakin tinggi pula kemandirian

pemerintah dalam mengelola daerahnya dan sebaliknya jika rasio yang dihasilkan menurun maka tingkat kemandirian pemerintah daerah akan dipertanyakan.

Kota Bandung merupakan salah satu daerah otonom yang diberikan wewenang oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah diharapkan Kota Bandung dapat menggali potensi yang dimiliki daerahnya sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPKA Kota Bandung, terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Daerah. Dimana pada tahun 2015-2017, Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandung mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sedangkan pada tahun 2018-2021 mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Disisi lain, menurut Christian Julianto, menuturkan bahwa tingkat pencapaian kinerja yang diraih Pemerintah Kota Bandung tahun 2019 mengalami penurunan sehingga hasilnya jauh dari visi dan misi yang ada pada RPJMD Kota Bandung tahun 2018-2023 (Tagar.id, 2020).

Agar laporan keuangan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan pembuatan keputusan serta pengukuran dan evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah, maka laporan keuangan tersebut perlu di analisis lebih lanjut karena opini BPK terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan tidak sepenuhnya mencerminkan baik atau tidaknya kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung, maka perlu dinilai kembali kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung menggunakan teknik analisis rasio keuangan. Berikut perhitungan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung menggunakan rasio kemandirian tahun anggaran 2015-2021.

Tabel 1.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung  
Tahun 2015-2021  
(Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Kinerja Keuangan (%)
2015	1.859,69	3.144,49	59,14
2016	2.152,76	3.186,71	67,55
2017	2.578,46	3.135,98	82,22
2018	2.571,59	3.324,85	77,34
2019	2.548,26	3.626,14	70,27
2020	2.063,78	3.352,26	61,56
2021	2.195,97	3.417,76	64,25
<b>Rata-Rata</b>			<b>68,91</b>

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu dan PPID Kota Bandung (data diolah, 2022)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun 2015-2021 yang menggunakan perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015, 2016 dan 2017 kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung mengalami peningkatan yang masing-masing sebesar 59,14%, 67,55% dan 82,22%, sedangkan tiga tahun berikutnya



mengalami penurunan yaitu tahun 2018 sebesar 77,34%, tahun 2019 sebesar 70,27% dan tahun 2020 sebesar 61,56%, kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 64,25%. Jika dihitung rata-rata tingkat kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung selama 7 tahun sebesar 68,91%.

Peningkatan dan penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dikaitkan oleh beberapa faktor, dalam penelitian ini faktor-faktor yang digunakan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Wahyudin dan Hastuti (2020) menentukan variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal kaitannya terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, kemudian penelitian Jauhariah (2022) mengambil pada variabel pendapatan asli daerah dan belanja modal. Mengacu pada dua penelitian terdahulu, sehingga peneliti menentukan tiga faktor yang dapat dikaitkan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal.

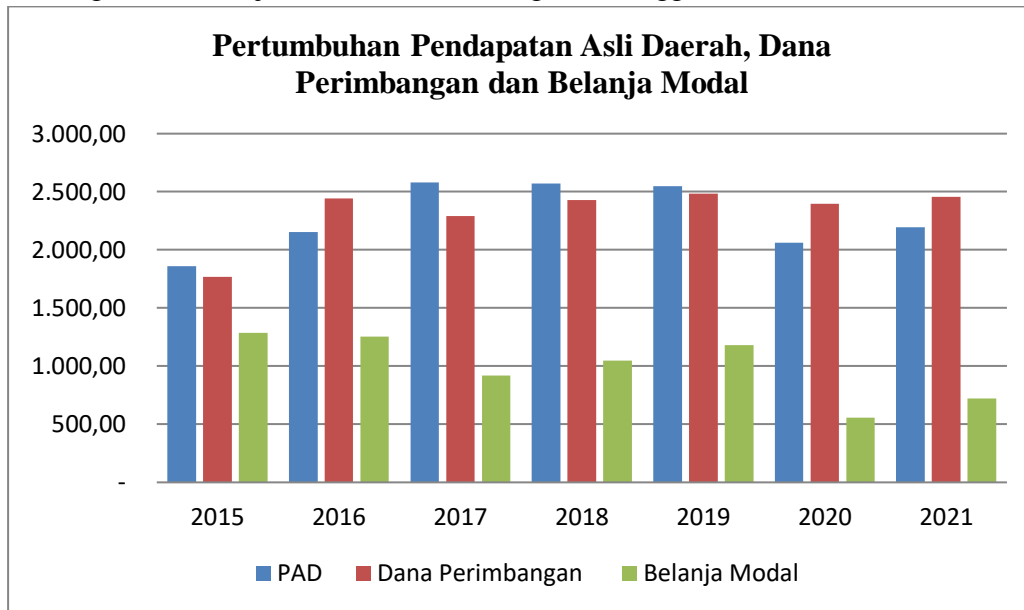
Faktor pertama, menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. PAD adalah penerimaan daerah yang berasal dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD merupakan salah satu sumber utama dalam pembiayaan dan pengeluaran daerah. Kemampuan daerah dalam memanfaatkan dan mengelola penerimaan PAD sebagai sumber keuangan daerah dapat mencerminkan kinerja keuangan pemerintah daerah (Antari dan Sedana, 2018). Oleh karena itu dalam pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan sumber penerimaan yang berasal dari PAD terhadap struktur APBD, sehingga tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat semakin kecil (Ekasuryana, 2018).

Faktor kedua, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan merupakan bagian terbesar dari pembiayaan kegiatan pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah serta mengurangi kesenjangan antar pemerintah daerah. Menurut Putri dan Darmayanti (2019) bahwa penerimaan dana perimbangan menggambarkan kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah, semakin besarnya dana perimbangan yang diterima maka kemampuan pemerintah dalam menggali potensi daerah semakin rendah dan kemandirian keuangan juga semakin rendah sehingga mengindikasikan lemahnya kinerja keuangan pemerintah daerah.

Faktor ketiga, Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dikeluarkan dalam rangka pengadaan barang ataupun pembangunan aktiva tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari satu periode akuntansi (PP No. 71 Tahun 2010). Belanja modal ditunjukkan dalam bentuk aset tetap berupa peralatan, pembangunan, infrastruktur dan aset tetap lainnya. Belanja modal sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah

daerah karena sangat berkaitan dengan kualitas pelayanan publik yang akan diberikan kepada masyarakat. Semakin tinggi investasi modal diharapkan mampu meningkatkan pembangunan di suatu daerah dan kualitas pelayanan publik.

Berikut ini disajikan data mengenai pertumbuhan pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal Kota Bandung tahun anggaran 2015-2021.



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu dan PPID Kota Bandung (data diolah, 2022)

Gambar 1.1 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Kota Bandung Tahun Anggaran 2015-2021 (Dalam Miliar Rupiah)

Berdasarkan grafik diatas, pertumbuhan pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal mengalami fluktuasi setiap tahunnya, jika dilihat dari presentase kenaikan dan penurunan, pendapatan asli daerah pada tahun 2016 dan 2017 mengalami kenaikan sebesar 16% dan 19%, sedangkan tiga tahun berturut-turut di tahun 2018-2020 PAD mengalami penurunan yang masing-masing sebesar -0,3%, -1% dan -19%, tetapi PAD di tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 6%. Selanjutnya pada dana perimbangan tahun 2016, 2018, 2019 dan 2021 mengalami kenaikan masing-masing sebesar 38%, 6%, 2% dan 0,5%, sedangkan hanya di tahun 2017 dan 2020 mengalami penurunan sebesar -6% dan -4%. Naik turunnya pertumbuhan PAD menunjukkan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan asli daerah dan besarnya dana perimbangan yang diterima mengindikasikan masih adanya tingkat ketergantungan keuangan daerah Kota Bandung terhadap pemerintah pusat.

Selain itu, pada belanja modal tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan sebesar -3% dan -27%, namun pada tahun 2018 dan 2019 naik sebesar 14% dan 12% akan tetapi ditahun 2020 belanja modal mengalami penurunan drastis sebesar -53% dan kenaikan terjadi di tahun berikutnya sebesar 29%. Hal ini menunjukkan ketidakstabilan pemerintah dalam meningkatkan pembangunan di daerah dan kecilnya rata-rata belanja modal Kota

Bandung tahun 2015-2021 yang hanya berkisar 20% dari total belanja daerah. Fakta ini didukung oleh data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tercatat bahwa 35,6% dari total anggaran belanja daerah direalisasi untuk belanja pegawai dan hanya 19,4% untuk belanja modal. Rendahnya nilai kinerja keuangan pemerintah daerah dimata masyarakat diakibatkan karena lebih tingginya porsi anggaran belanja tidak langsung seperti belanja pegawai daripada belanja langsung (Wahyudin dan Hastuti, 2020).

Menurut penelitian yang dilakukan Sari (2020) menyatakan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan, dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian lain yang dilakukan Prastiwi dan Aji (2020) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan, dana perimbangan berpengaruh signifikan negatif dan belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan dalam penelitian Wahyudin dan Hastuti (2020) pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal secara parsial dan simultan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hal ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dari hasil penelitian sebelumnya dan diindikasikan terdapat *research gap*. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menguji kembali penelitian dengan judul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2015-2021”**.

## **1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pengelolaan keuangan dari hasil suatu kegiatan, program ataupun kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah juga merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam melaksanakan aturan pengelolaan keuangan secara baik dan benar untuk mempertahankan pelayanan yang diinginkan. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran, kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bandung diindikasikan belum maksimal hal tersebut dilihat dari hasil perhitungan rasio kemandirian tahun 2015-2021. Kinerja keuangan pemerintah daerah yang belum maksimal tidak lepas dari faktor-faktor yang terkait, dalam penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal.

Faktor pertama, pendapatan asli daerah memiliki peranan yang sangat penting bagi kinerja keuangan pemerintah daerah karena besarnya pungutan PAD sebagai sumber utama dalam pembiayaan dan pengeluaran daerah dapat mencerminkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Faktor kedua, dana perimbangan merupakan bagian terbesar dari

pembiayaan kegiatan pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah serta mengurangi kesenjangan antar pemerintah daerah. Namun, semakin besarnya dana perimbangan yang diterima maka semakin tinggi pula tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat sehingga membuat lemahnya kinerja keuangan pemerintah daerah. Faktor ketiga, belanja modal sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena sangat berkaitan dengan kualitas pelayanan publik yang akan diberikan kepada masyarakat. Semakin tinggi investasi modal diharapkan mampu meningkatkan pembangunan di suatu daerah dan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan presentase pertumbuhan pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal mengalami fluktuasi setiap tahunnya, naik turunnya pertumbuhan PAD menunjukkan ketidak mampuan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan asli daerah dan besarnya dana perimbangan yang diterima mengindikasikan masih adanya tingkat ketergantungan keuangan daerah Kota Bandung terhadap pemerintah pusat. Selain itu, pertumbuhan belanja modal mencerminkan ketidakstabilan pemerintah dalam meningkatkan pembangunan di daerah dan rata-rata belanja modal Kota Bandung tahun 2015-2021 hanya mencapai 20% dari jumlah belanja daerah.

Data yang ditampilkan pada latar belakang mengidentifikasi adanya kesenjangan (gap) teori dengan kenyataan yang ada pada penelitian ini. Hal ini terlihat dengan adanya ketidakonsistenan antara variabel independen dengan variabel dependen dan telah dibuktikan oleh beberapa penelitian terdahulu.

### **1.2.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan rumusan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah antara lain sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun anggaran 2015-2021?
2. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun anggaran 2015-2021?
3. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun anggaran 2015-2021?
4. Apakah pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun anggaran 2015-2021?

## **1.3 Maksud dan Tujuan**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keterkaitan atau hubungan antara pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja

keuangan pemerintah daerah, menyimpulkan hasil penelitian, serta memberikan saran kepada Pemerintah Daerah Kota Bandung terkait kinerja keuangan pemerintah daerah.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun anggaran 2015-2021.
2. Untuk menganalisis pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun anggaran 2015-2021.
3. Untuk menganalisis pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun anggaran 2015-2021.
4. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun anggaran 2015-2021.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Praktis**

#### **1. Bagi Pemerintah**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang positif bagi Pemerintah Daerah Kota Bandung dan diharapkan dapat digunakan sebagai masukan yang bermanfaat berupa bukti empiris mengenai pengaruh dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

#### **2. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu informasi yang transparan mengenai pertumbuhan pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal dan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung.

### **1.4.2 Kegunaan Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi akuntansi pada umumnya dan khususnya akuntansi sektor publik mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal kaitannya terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Akuntansi Sektor Publik**

Istilah sektor publik memiliki pengertian yang beragam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum dan sosial) memiliki cara pandang yang berbeda-beda. Sektor publik dari sudut pandang ilmu ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan jasa kepada publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Pada organisasi sektor publik sumber daya ekonomi yang dikelola tidak untuk mencari laba ataupun keuntungan.

Menurut Mardiasmo (2018) akuntansi sektor publik merupakan suatu alat penyedia informasi akuntabilitas dan pengendalian manajemen bagi pemerintah maupun publik. Sedangkan, menurut Bastian (2017) akuntansi sektor publik merupakan mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diaplikasikan pada pengelolaan keuangan dilembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya seperti pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial serta proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Sektor publik memiliki berbagai macam bentuk dalam masyarakat, sebagian besar merupakan organisasi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun sektor publik yang menjalankan aktivitasnya dalam bentuk yayasan, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, LSM, rumah sakit dan partai politik.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik merupakan suatu entitas yang kegiatannya berhubungan dengan usaha, yang berkaitan dengan keuangan guna mengambil keputusan untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik melalui pelayanan yang diselenggarakan oleh entitas perusahaan.

##### **2.1.1 Tujuan Akuntansi Sektor Publik**

Menurut Hasanah dan Fauzi (2017) secara umum tujuan akuntansi pemerintah adalah memberikan dan menyajikan informasi pelaporan keuangan atas transaksi yang dilakukan pada periode tertentu. Secara khusus tujuan akuntansi pemerintah, antara lain:

1. Akuntabilitas, kewajiban sektor publik dalam mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan.
2. Manajerial, akuntansi pemerintah memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan fungsi manajerial dengan melakukan perencanaan berupa penyusunan APBN dan strategi pembangunan lain.
3. Pengawasan, akuntansi pemerintahan dibuat untuk memungkinkan diadakannya pengawasan pengurusan keuangan negara dengan lebih mudah oleh aparat pemeriksa seperti BPK-RI.

Sedangkan, menurut Mardiasmo (2018) tujuan akuntansi pada sektor publik antara lain:

1. Memberikan informasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan secara tepat, efisien dan ekonomis pada suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini berkaitan dengan pengendalian manajemen (*Manajemen Control*).
2. Memberikan informasi yang memungkinkan untuk manajer melaporkan pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini berkaitan dengan akuntabilitas (*Accountability*).

Disimpulkan dari pernyataan diatas bahwa tujuan akuntansi sektor publik adalah memberikan informasi yang digunakan untuk mengambil sebuah keputusan secara efisien yang dikelola organisasi yang dapat di percaya serta melakukan pelaporan pertanggungjawaban kepada publik atas hasil operasi atau dana publik yang telah dipergunakan.

## **2.2 Keuangan Daerah**

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut (PP No. 12 Tahun 2019). Menurut Khusaini (2018) pengelolaan keuangan merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah, mengoptimalkan pelayanan publik yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Dalam pedoman pengelolaan keuangan daerah yang diatur Permendagri No. 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Ruang lingkup keuangan daerah berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005 meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak lain;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;

5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Diterapkannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola keuangannya sendiri dengan mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut (Widodo, S., 2022):

1. Akuntabilitas, pemerintah dalam mengambil suatu keputusan sesuai dengan mandat atau amanah yang diterimanya. Kebijakan yang ada harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara *vertical* maupun *horizontal* kepada masyarakat.
2. Transparansi, pemerintah harus terbuka dalam menyusun suatu kebijakan keuangan daerah, sehingga dapat diawasi oleh DPRD dan masyarakat.
3. Kejujuran, dalam mengelola keuangan daerah harus dipercayakan kepada pengelola yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan.
4. *Value Of Money*, dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran harus memperhatikan ekonomi, efektivitas dan efisiensi.
5. Pengendalian, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan monitoring terhadap setiap penerimaan maupun pengeluaran APBD.

## **2.3 Pendapatan Asli Daerah**

### **2.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah atau disebut dengan PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan wujud asas desentralisasi yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Sumber pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Menurut Ariska (2021) pendapatan asli daerah merupakan seluruh penerimaan yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai peningkatan kekayaan bersih dalam satu periode tertentu yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan asli daerah sebagai sumber penerimaan daerah diharapkan terus bertambah agar mampu mendanai sebagian belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun terus meningkat, sehingga tercapainya kemandirian daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang digali dari potensi suatu daerah berdasarkan peraturan



perundang-undangan, yang digunakan sebagai salah satu sumber pendanaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

### **2.3.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 mengacu pada pasal 30 sampai pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019, pendapatan asli daerah terdiri atas;

#### **1. Pajak Daerah**

Sumber pertama penerimaan pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa sesuai undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah dari sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak daerah dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Jenis Pajak Provinsi Terdiri Atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - d. Pajak Air Permukaan
  - e. Pajak Rokok
- 2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota Terdiri Atas:
  - a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Reklame
  - e. Pajak Penerangan Jalan
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Bantuan
  - g. Pajak Parkir
  - h. Pajak Air Tanah
  - i. Pajak Sarang Burung Walet
  - j. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
  - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

#### **2. Retribusi Daerah**

Retribusi merupakan pengutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009). Terdapat beberapa golongan retribusi Kota/Kabupaten, diantaranya:

- 1) Retribusi Jasa Umum merupakan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa umum meliputi:
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
  - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil
  - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat
  - e. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
  - f. Retribusi Pelayanan Pasar
  - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
  - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
  - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
  - j. Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus
  - k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
  - l. Retribusi Pelayanan Tera/Tela Ulang
  - m. Retribusi Pelayanan Pendidikan
  - n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- 2) Retribusi Jasa Usaha merupakan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
  - b. Retribusi Grosir Dan/Atau Pertokoan
  - c. Retribusi Tempat Pelelangan
  - d. Retribusi Terminal
  - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
  - f. Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa
  - g. Retribusi Rumah Potong Hewan
  - h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
  - i. Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga
  - j. Retribusi Penyeberangan di Air
  - k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu meliputi:
  - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
  - b. Retribusi Izin Tempat Jualan Minuman Beralkohol
  - c. Retribusi Izin Gangguan
  - d. Retribusi Izin Trayek
  - e. Retribusi Izin Usaha Perikanan

### 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pengelolaan kekayaan yang dipisahkan merupakan bagian dari pendapatan asli daerah, antara lain:

- a. Bersumber dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- b. Bagian laba dari lembaga keuangan bank
- c. Bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.

### 4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Berdasarkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan lain-lain PAD yang sah, meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Hasil pemanfaatan atau penyalahgunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- c. Jasa giro
- d. Pendapatan bunga
- e. Tuntutan ganti rugi
- f. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

## 2.4 Dana Perimbangan

### 2.4.1 Pengertian Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Menurut Budianto dan Alexander (2016) dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun maksud pemerintah pusat memberikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah (Subelan dalam penelitian Damara, 2021), yaitu:

1. Membantu daerah dalam mendanai kewarganegaraannya dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah.
3. Mengurangi kesenjangan pendanaan antar pemerintah daerah.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa dana perimbangan dimaksudkan untuk membantu daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dengan tujuan mengurangi ketimpangan dan kesenjangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **2.4.2 Jenis-Jenis Dana Perimbangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Perimbangan terdiri dari tiga bagian yaitu:

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil dilakukan atas prinsip *by origin* (daerah penghasil) dan penyaluran berdasarkan realisasi penerimaan. Porsi pembagian DBH yaitu berasal dari pendapatan APBN yang dibagihasilkan berdasarkan presentase tertentu, pendapatan APBN yang dibagihasilkan di antaranya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh pasal 21 serta dana bagi hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum merupakan salah satu dana transfer pemerintah pusat kepada daerah yang bersumber dari pendapatan APBN dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat block grant yang berarti dalam penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah memberikan dana perimbangan guna mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan kebutuhan pendanaan yang besar di daerah dengan porsi sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang telah ditetapkan APBN. Proposi dana alokasi umum dihitung berdasarkan perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Proposi yang telah ditetapkan yaitu dengan imbalan 10% untuk provinsi dan 90% untuk kabupaten/kota.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana lokasi khusus merupakan dana transfer yang dialokasikan kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus sebagai urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Selain itu, dana alokasi khusus juga bertujuan untuk mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat guna meningkatkan pembangunan daerah. DAK sendiri memiliki karakter yang paling spesifik diantara dana transfer lainnya, berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintah menetapkan kriterianya dana alokasi khusus yang meliputi:

- a. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah APBD.
- b. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah.
- c. Kriteria teknis diterapkan oleh Kementerian Negara atau Departemen Teknis.

Pelaksanaan DAK sendiri diserahkan kepada bagian investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomi yang panjang.

## **2.5 Belanja Modal**

### **2.5.1 Pengertian Belanja Modal**

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset tetap lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal merupakan bagian dari belanja daerah yang dijadikan salah satu anggaran oleh pemerintah daerah dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap dan aset lainnya baik untuk kelancaran tugas pemerintah maupun untuk meningkatkan fasilitas publik. Dalam pemanfaatan aset tetap yang dihasilkan tersebut, ada yang bersinggungan atau dipakai oleh publik dan ada yang tidak langsung dimanfaatkan oleh publik.

Dalam menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana berupa belanja modal dalam APBD sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan manfaat jangka panjang secara finansial. Sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. Per-33/PB/2008, suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila:

- a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan diperolehnya aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas.
- b. Pengeluaran tersebut melebihi minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan pemerintah.
- c. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

### **2.5.2 Sumber-Sumber Belanja Modal**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.02/2011 tentang klasifikasi anggaran, belanja modal dibagi menjadi beberapa jenis belanja antara lain:

#### **1. Belanja Modal Tanah**

Belanja modal tanah merupakan pengeluaran biaya yang digunakan untuk pengadaan barang/pembelian/pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan pengolahan hak atas tanah

sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai agar manfaatnya bisa segera diperoleh.

## 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin ini merupakan pengeluaran/biaya yang digunakan untuk tujuan pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kualitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun periode akuntansi. Setelah adanya pengeluaran, peralatan dan mesin dipastikan dalam kondisi siap pakai.

## 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan merupakan pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/pergantian dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas gedung dan bangunan dalam kondisi siap pakai.

## 4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan ini merupakan pengeluaran/biaya yang digunakan untuk kegiatan penambahan, pengadaan, pergantian dan peningkatan kualitas pembangunan/pembuatan serta penawaran dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan dalam kondisi siap dipakai.

## 5. Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja modal aset lainnya merupakan pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/pergantian serta penawaran terhadap aset tetap lainnya yang tidak dikategorikan dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan. Yang termasuk pada belanja modal lainnya yaitu belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang kesenian, purbakala dan jurna ilmiah.

## 6. Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU)

Belanja modal badan layanan umum ini merupakan pengeluaran untuk pengadaan/perolehan/pembelian aset yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU.

## 2.6 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

### 2.6.1 Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahsun (2012) kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pengelolaan keuangan atas pelaksanaan suatu kegiatan, program ataupun kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan selama satu periode tertentu (Ariska, 2021).

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dari seberapa besar kemampuan daerah dalam menggali potensi-potensi yang dimiliki, sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah disetiap tahunnya (Antari dan Sedana, 2018). Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk dilakukan karena dengan diterapkannya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah dapat mengelola keuangan secara mandiri agar proses pembangunan dapat diselesaikan dengan cepat tanpa menunggu bantuan dari pusat (Putri dan Damayanti, 2019). Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu (Mardiasmo, 2018:121):

- a. Memperbaiki kinerja pemerintah daerah, ukuran kinerja yang dimaksud untuk membantu pemerintah fokus pada sasaran dan tujuan program yang telah ditetapkan sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas dalam memberikan pelayanan publik
- b. Membantu mengalokasikan sumber daya dalam pengambilan keputusan
- c. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan

### 2.6.2 Indikator Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang dapat menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan beberapa indikator yaitu (Jauhariah, 2022):

1. Indikator Masukan (*Inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan menghasilkan output. Indikator masukan dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan atau peraturan perundang-undangan dan sebagainya.
2. Indikator Proses (*Process*) adalah perumusan ukuran kegiatan baik dari segi kecepatan, ketetapan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Indikator proses dapat berupa ketaatan pada peraturan perundang-undangan ataupun rata-rata yang diperlukan untuk menghasilkan layanan jasa.
3. Indikator Keluaran (*Output*) adalah segala sesuatu yang diharapkan dapat langsung dicapai dari suatu kegiatan berupa fisik dan/atau nonfisik, seperti ketepatan dalam memproduksi barang dan jasa.

4. Indikator Hasil (*Outcomes*) adalah segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan yang diadakan, seperti kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah.
5. Indikator Dampak (*Impact*) adalah pengeluaran yang ditimbulkan baik positif ataupun negatif terhadap setiap indikator berdasarkan pada asumsi yang telah ditetapkan, seperti adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

### 2.6.3 Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan melaksanakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Analisis rasio keuangan pada pemerintah dilakukan dengan membandingkan unsur-unsur yang terdapat pada laporan keuangan sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi pada satu periode tertentu (Pratiwi, 2018). Terdapat beberapa jenis pengukuran rasio kinerja keuangan pemerintah daerah diantaranya rasio kemandirian, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan. Pada penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah rasio kemandirian. Rasio kemandirian yaitu rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan Pendapatan Transfer. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan mandiri apabila rasio yang dihasilkan mencapai 100%, semakin besar rasio kemandirian yang dihasilkan maka kinerja keuangan daerah semakin baik. Melalui rasio ini menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, semakin tinggi rasio kemandirian maka semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi sebagai pendapatan asli daerah (Candra, 2019).

Rasio Kemandirian dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transer}} \times 100\%$$

Untuk lebih jelasnya berikut terdapat tabel mengenai pola hubungan kemandirian keuangan daerah:

Tabel 2.1 Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 - 25	Instruktif
Rendah	>25 - 50	Konsultatif
Sedang	>50 - 75	Partisipatif
Tinggi	>75 - 100	Delegatif

Sumber: Susilowati, 2018



Keterangan pola hubungan:

- Pola hubungan instruktif adalah peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian daerah.
- Pola hubungan konsultatif menggambarkan bahwa campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah telah dianggap mampu melaksanakan otonomi daerah.
- Pola hubungan partisipatif menggambarkan bahwa peran pemerintah pusat semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.
- Pola hubungan delegatif yang menggambarkan bahwa pemerintah daerah telah benar mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

## 2.7 Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

### 2.7.1 Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.2 Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Riri Yuni Ariska (2021) "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten atau Kota Provinsi Sumatera Utara Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara	Independen: -Pendapatan asli daerah -Dana perimbangan -Belanja modal  Dependen: - Kinerja keuangan daerah	Data laporan keuangan Pemerintah Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara periode 2017-2020	Uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis	Secara parsial: - Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah - Dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah - Belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Secara simultan: - Pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah
2	Nanda Dipa	Independen:	Data	Uji statistik	Secara parsial:

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Pratiwi dan Andri Waskita Aji (2020) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018”	-Pendapatan asli daerah - Dana perimbangan - Dana keistimewaan - Belanja modal  Dependen: - Kinerja keuangan daerah	laporan realisasi APBD selama periode 2013-2018	deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis	-Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah - Dana perimbangan berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan daerah - Dana keistimewaan berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah - Belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah Secara simultan: - Pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dana keistimewaan dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah
3	Faesar Fazlurahman, Candra Fatriananda dan Rifqie Jauhari (2020) “Analisis Kinerja Keuangan	Kinerja keuangan daerah	Data laporan keuangan Kota Bandung	Analisis deskriptif	-Kemandirian Kota Bandung selama tahun 2014-2018 mengalami peningkatan namun dalam kategori tidak

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Pemerintah Kota Bandung Sebelum Dan Sesudah Mendapatkan WTP Dari BPK”				<p>optimal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Efektivitas PAD tahun 2014-2018 mengalami peningkatan dan penurunan</li> <li>- Tingkat efisiensi PAD dalam kategori efisien dilihat dari biaya pungutan PAD lebih kecil dari PAD</li> <li>- Tingkat rasio pertumbuhan PAD tahun 2014-2017 mengalami stagnasi. Namun, tahun 2018 berhasil optimalkan sumber-sumber PAD</li> </ul>
4	Novita Sari, Benny R., Rosma A.P., Taruli Br. S., dan Wahyu B. (2020) “Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan”	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja modal</li> <li>- Pendapatan asli daerah</li> <li>- Dana perimbangan</li> </ul> <p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinerja keuangan daerah</li> </ul>	Data laporan keuangan pemerintah daerah	Uji asumsi klasik analisis linier berganda, uji t dan Uji f	<p>Secara parsial:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah</li> <li>- Dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah</li> <li>- Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah</li> </ul> <p>Secara simultan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja modal, dana perimbangan dan pendapatan asli</li> </ul>

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah
5	Tri Y. Pratiwi (2018) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016”	Independen: - Pendapatan asli daerah - Dana perimbangan - Belanja modal	Laporan realisasi APBD tahun anggaran 2012-2016	Uji asumsi klasik, analisis regresi linier sederhana dan berganda, uji hipotesis	Secara parsial: - Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah - Dana perimbangan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah - Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah Secara simultan: - Pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah
6	Indriani P. Ekasuryana, Arief Tri Hardiyanto dan Dessy Herlisnawati (2018) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Terhadap	Independen: - Pendapatan asli daerah - Dana perimbangan  Dependen: - Kinerja keuangan daerah	Laporan realisasi anggaran Kab. Bogor tahun 2011-2016	Puposive sampling, statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dan uji hipotesis	Secara parsial: - Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah - Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor 2011-2016”				Secara simultan: -Pendapatam asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah
7	Ihsan Wahyudin dan Hastuti (2020) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat”	Independen: -Pendapatan asli daerah -Dana perimbangan \\ -Belanja modal  Dependen: -Kinerja keuangan daerah	Data laporan realisasi APBD pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2018	Uji asumsi klasik, analisis regresi linier sederhana dan berganda, uji hipotesis	Secara parsial: -Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah -Dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah -Belanja modal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah Secara simultan: -Pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah
8	Ni Putu Gina Sukama Antari dan Ida Bagus Panji Sedana (2018) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal	Independen: - Pendapatan asli daerah - Belanja modal  Dependen: - Kinerja keuangan	Laporan keuangan pemerintah Kab/Kota se-Provinsi Bali	Observasi nonn partisipan dengan teknis analisis regresi linier berganda	Secara parsial: -Pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”	daerah			- Belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
9	Rahmat Saleh (2020) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah”	Independen: - Pendapatan asli daerah - Dana perimbangan  Dependen: - Kemandirian keuangan daerah	Laporan realisasi APBD dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kab. Bogor 2012-2017	Analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis linier berganda dan uji koefisien regresi	Secara parsial: - Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah - Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah Secara simultan: - Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah
10	Mia Jauhariah, Ernadhi Sudarmanto dan Sigit Edy Surono (2022) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2014-2021”	Independen: - Pendapatan asli daerah - Belanja modal	Data realisasi APBD Kota Bogor 2014-2021	Analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda	Secara parsial: - Pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah - Belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Secara simultan: - Pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
					terhadap kinerja keuangan daerah
11	Isnurrini Hidayat Susilowati, Julia Retnowulan dan Wiwik Widiyanti (2018) "Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Periode Tahun 2012-2016"	Kinerja keuangan	Data laporan realisasi anggaran Kota Bogor	Analisis deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rata-rata rasio derajat desentralisasi tahun 2012-2016 sebesar 26,96%</li> <li>- Tingkat kemandirian Kota Bogor menunjukkan pola delegatif yaitu membayar pajak dan retribusi daerah merupakan komponen PAD semakin tinggi</li> <li>- Efektivitas keuangan daerah Kota Bogor cukup baik dengan rata-rata 100%</li> <li>- Rasio belanja langsung mengalami peningkatan, sedangkan rasio belanja tidak langsung mengalami penurunan tahun 2012-2016</li> <li>- Pertumbuhan PAD tahun 2012-2016 menunjukkan pertumbuhan yang positif</li> </ul>

Sumber: Ariska, R. (2021), Prastiwi, N., dan Aji, A. (2020), Fazlurahman (2020), Sari, N., Nainggolan, B., Purba, R., Saragih, T., dan Banjarnahor, W. (2020). Pratiwi, T. (2018), Ekasuryana, I., Hardiyanto, A., dan Herlisnawati, D. (2018), Wahyudin, I., dan Hastuti (2020), Antari, N., dan Sedana, I., (2018), Saleh, R. (2020), Jauhariyah, M., Sudarmanto, E., dan Surono, S. (2022) dan Susilowati (2018).

Dalam penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan meliputi variabel independen, variabel dependen, unit analisis dan subjek yang diteliti, periode data yang diteliti dan metode yang digunakan. Pada penelitian ini memiliki persamaan pada variabel independen pendapatan asli daerah dengan Ariska (2021), Wahyudin dan Hastuti (2020) dan Pratiwi (2018). Persamaan pada variabel independen dana perimbangan juga terdapat pada penelitian Saleh (2020) dan Ekasuryana, (2018). Persamaan variabel independen belanja modal terdapat pada penelitian Antari dan Sedana (2018), Jauhariah (2022) dan Sari (2020). Pada penelitian ini memiliki persamaan variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah yang terdapat pada Pratiwi dan Aji (2020). Lalu penelitian yang akan penulis lakukan memiliki perbedaan metode yang digunakan dengan Fazlurahman (2020) dan Susilowati (2018). Periode data penelitian ini tahun 2015-2021 berbeda dengan semua penelitian terdahulu, sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan penulis dalam mengerjakan penelitian ini.

## **2.7.2 Kerangka Pemikiran**

### **2.7.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemampuan daerah dalam menggali dan memanfaatkan potensi daerah dapat menghasilkan PAD yang berkontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah yang berimplikasi pada kinerja keuangan pemerintah daerah (Pratiwi dan Aji, 2020). Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2018) yang menyatakan bahwa semakin tingginya penerimaan PAD menunjukkan kemampuan daerah dalam memaksimalkan penerimaan pemerintah daerah yang nantinya akan berimplikasi pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin baik.

### **2.7.2.2 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Dana perimbangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada setiap daerah untuk mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kebijakan penggunaan dana perimbangan diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dikelola dan digunakan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik guna memajukan perekonomian daerah. Dalam penggunaannya tersebut diharapkan pemerintah dapat melaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan karena dengan semakin besar penerimaan dana yang diperoleh maka semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga akan mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil



penelitian Ariska (2021) yang menyatakan bahwa semakin tinggi dana perimbangan yang diterima daerah maka semakin rendah atau menurun tingkat kemandirian daerah. Hal ini menunjukkan lemahnya kinerja keuangan pemerintah daerah.

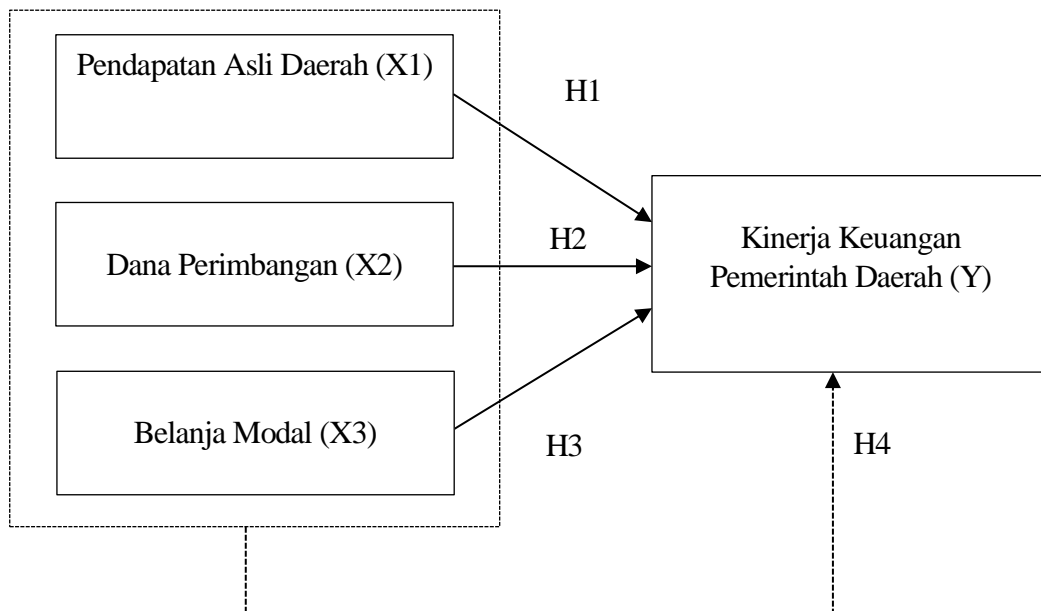
### **2.7.2.3 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Belanja modal menurut PP No. 71 Tahun 2010 merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Meningkatnya pengalokasian dana pada belanja modal dapat membantu daerah untuk memperoleh sumber keuangan yang menghasilkan pendapatan daerah sehingga berimplikasi pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Kegiatan belanja modal yang dapat menghasilkan sumber keuangan berasal dari pembangunan infrastruktur berupa fasilitas pelayanan umum (Antari dan Sedana, 2018). Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian Wahyudin dan Hastuti (2020) bahwa tersedianya infrastruktur di suatu daerah yang memadai diharapkan mampu menciptakan efisiensi di berbagai sektor dan meningkatnya produktivitas masyarakat sehingga berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin baik.

### **2.7.2.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal memiliki peranan yang besar sebagai sumber pembiayaan yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan PAD mendorong kinerja keuangan pemerintah menjadi lebih baik, hal ini karena PAD sebagai sumber utama pembiayaan daerah dapat menentukan kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya. Sedangkan, peningkatan dana perimbangan yang diterima menandakan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat yang menunjukkan lemahnya kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, belanja modal juga berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, semakin meningkatnya jumlah belanja modal mengindikasikan terjadinya pertumbuhan pembangunan daerah yang pesat sehingga terdapat upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudin dan Hastuti (2020), Pratiwi (2018) dan Sari (2020) yang menyatakan bahwa secara simultan pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka dibuat suatu kerangka pemikiran yang menggambarkan variabel-variabel yang telah dijelaskan sebelumnya yang dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

## 2.8 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat dibangun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung
- H2 : Dana Perimbangan Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung
- H3 : Belanja Modal Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung
- H4 : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian verifikatif. Penelitian verifikatif (*Verificative Research*) yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori atau hasil penelitian sebelumnya, sehingga diperoleh hasil untuk memperkuat atau menggugurkan teori atau hasil sebelumnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan metode yang digunakan *explanatory survey*.

*Explanatory survey* yaitu metode yang bertujuan untuk menguji hipotesis, yang umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel. Dalam penelitian ini variabel yang dimaksud berupa pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun anggaran 2015-2021.

#### **3.2 Objek, Unit Analisis Dan Lokasi Penelitian**

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal, serta variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah.

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Geographic Region*, maksud dari *Geographic Region* adalah wilayah/daerah/negara, sehingga data mengenai atau berasal dari (*Respon*) suatu wilayah/daerah/negara tertentu. Lokasi penelitian yang akan dilakukan di wilayah Pemerintah Daerah Kota Bandung.

#### **3.3 Jenis Dan Sumber Data Penelitian**

Jenis data yang akan diteliti adalah data kuantitatif yaitu data sekunder yang diperoleh melalui media elektronik dari website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan ([www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Bandung ([www.pp.id.bandung.go.id](http://www.pp.id.bandung.go.id)) berupa Laporan Realisasi Anggaran Kota Bandung tahun anggaran 2015-2021. Data kuantitatif merupakan jenis data penelitian yang berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji perhitungan dikaitkan dengan masalah yang akan diteliti untuk menghasilkan kesimpulan. Sedangkan, data sekunder adalah data yang tersedia sebelumnya yang kemudian dikumpulkan dari sumber yang tidak langsung misalnya sumber tertulis milik pemerintah atau perpustakaan.

#### **3.4 Operasional Variabel**

Untuk memudahkan proses dalam menganalisis, maka terlebih dahulu penulis mengklasifikasikan variabel-variabel penelitian ke dalam dua kelompok, yaitu:

1. Variabel Independen (Variabel Bebas)  
Variabel ini merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain (variabel dependen), setiap terjadi perubahan terhadap variabel independen maka variabel dependen akan berubah atas perubahan tersebut. Dalam penelitian ini variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal.
2. Variabel Dependen (Variabel Terikat)  
Variabel ini merupakan variabel yang keadaannya dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel dependen adalah kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tabel 3.1 Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rasio Kemampuan Keuangan Daerah	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Rasio
Dana Perimbangan	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	$\frac{\text{Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Rasio
Belanja Modal	Rasio Efektifitas Belanja Modal	$\frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$	Rasio
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$	Rasio

Sumber: Mahmudi (2016)

### 3.5 Metode Penarikan Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi (Sugiyono, 2019). Pada penelitian ini sampel yang digunakan yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun anggaran 2015-2021 yang diperoleh dari situs resmi DJPK dan PPID Kota Bandung. Adapun teknik yang digunakan dalam penerikan sampling yaitu *Non Probability Sampling* yang memberikan peluang atau kesempatan tidak sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dapat dipilih menjadi sampel. Pendekatan yang digunakan berupa metode purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan objek penelitian.

Ciri utama sampling ini adalah sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian.

Kriteria khusus dalam menentukan sampel tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Kemudahan dalam memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian
2. Laporan keuangan yang berupa laporan realisasi anggaran tujuh tahun terakhir yang memberikan gambaran mengenai perkembangan dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal dan kinerja keuangan pemerintah daerah
3. Periode 2015-2021 lebih relevan dengan keadaan pada saat penelitian ini, sehingga hasilnya akan lebih akurat
4. Kota Bandung telah melaporkan data realisasi APBD di situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan dan PPID Kota Bandung tahun 2015-2021

### **3.6 Metode Pengumpulan Data**

Berdasarkan metode sampling diatas, maka data yang terpilih di kumpulkan melalui metode pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan cara mengunduh data Laporan Realisasi Anggaran tahun 2015-2021 dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan ([www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)) dan PPID Kota Bandung ([www.ppid.bandung.go.id](http://www.ppid.bandung.go.id)). Serta untuk melengkapi, memenuhi dan menyusun makalah seminar melalui prosedur pengumpulan data atau informasi yang diperoleh dengan studi kepustakaan yaitu penelitian dilakukan guna memperoleh data yang bersifat teori sebagai perbandingan dengan data penelitian yang diperoleh. Data diperoleh dari buku-buku ilmiah dan literatur yang berhubungan dengan penelitian serta menggunakan media internet berupa situs website lain sebagai tambahan informasi dan melengkapi data-data yang diperlukan.

### **3.7 Metode Pengolahan/Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kuantitatif berupa pengujian hipotesis menggunakan uji statistik SPSS 26. Metode yang digunakan adalah analisis data dengan langkah-langkah yaitu Analisis Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linier Berganda dan Uji Hipotesis.

#### **3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisa dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan mengenai besarnya pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal dan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung. Menurut Ghozali (2018) analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai suatu data yang dilihat dari rata-rata, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness.

### 3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linier berganda. Uji asumsi klasik pada umumnya mencakup Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi.

#### 1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018) uji normalitas bertujuan untuk menguji antar variabel memiliki distribusi normal atau tidak. Jika tidak normal maka prediksi yang telah dilakukan dengan metode tersebut akan tidak baik atau dapat menghasilkan predikat yang menyimpang. Model yang baik yaitu berdistribusi normal atau mendekati normal. Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Pada penelitian ini normalitas menggunakan uji plot dan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan nilai signifikan 5%. Jika nilai signifikan dari nilai *Kolmogorov-Smirnov*  $> 5\%$ , maka data yang digunakan berdistribusi normal.

#### 2. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2018) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji multikolinieritas dapat dilihat dari:

- a. Nilai *Tolerance*
- b. *Variance Inflation Factor* (VIF)

Nilai *cut off* yang umum digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah:

- Jika nilai VIF  $> 10$  atau tolerance  $< 0.10$  maka terjadi multikolinieritas
- Jika nilai VIF  $< 10$  atau tolerance  $> 0.10$  maka tidak terjadi multikolinieritas

#### 3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018) bahwa uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah model terjadi ketidaksamaan varian dan residual antar variabel bebas. Model yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji glejser dan *scatterplots*, dengan dasar analisis:

- Jika membentuk pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas

- Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 dan sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### 4. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2018) uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang beruntun sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini muncul karena kesalahan pengganggu tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas autokorelasi. Pengujian autokorelasi dilakukan menggunakan Run Test dengan pengambilan keputusan jika hasil nilai Asymp. Sig (2-Tailed)  $> 0,05$  maka tidak ditemukan gejala autokorelasi.

### 3.7.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda. Umumnya model regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran rasio dalam suatu persamaan linier. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda yaitu dengan melihat pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Adapun model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \beta_3.X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

$\alpha$  : Konstanta

X1 : Pendapatan Asli Daerah

X2 : Dana Perimbangan

X3 : Belanja Modal

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  : Koefisien Regresi Variabel Independen

$\varepsilon$  : Error

### 3.7.4 Uji Hipotesis

#### 1) Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Menurut Ghozali (2018) uji-t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel

dependen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan  $t_{\text{tabel}}$  dengan  $t_{\text{hitung}}$ . Pengujian menggunakan signifikan level 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ) dengan dasar pengambilan keputusan yang digunakan dalam uji-t sebagai berikut:

- Jika nilai  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$  dan nilai signifikan  $< 0,05 = H_0$  ditolak atau  $H_1$  diterima. Hal ini menyatakan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan secara individual terhadap variabel dependen.
- Jika nilai  $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$  dan nilai signifikan  $> 0,05 = H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Ini menyatakan bahwa variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara individu terhadap variabel dependen.

## 2) Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Menurut Ghazali (2018) uji statistik F mempunyai signifikan 0,05 dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- Jika nilai  $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$  dan nilai signifikan  $< 0,05$ . Maka hipotesis diterima dan dinyatakan bahwa secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
- Jika nilai  $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$  dan nilai signifikan  $> 0,05$ . Maka hipotesis ditolak dan dinyatakan bahwa secara simultan variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

## 3) Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada antara 0-1, nilai koefisien yang mendekati 0 memiliki arti semakin kecil kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel-variabel terikat sangat terbatas. Sebaliknya jika nilai koefisien determinasi mendekati 1 menandakan bahwa semakin tinggi kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikatnya (Ghozali, 2018).



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan terhadap Pemerintah Daerah Kota Bandung periode 2015-2021 yang telah menjadi sampel terpilih dengan menggunakan metode *purpose sampling* dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan sebagaimana dijelaskan pada BAB III.

##### **4.1.1 Sejarah Dan Perkembangan Kota Bandung**

Kota Bandung tidak berdiri bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Bandung. Kota ini dibangun dengan tenggang waktu yang sangat jauh setelah Kabupaten Bandung berdiri. Kabupaten Bandung dibentuk pada sekitar pertengahan abad ke-17 Masehi, dengan bupati pertama Tumenggung Wirangunangun. Ia memerintah Kabupaten Bandung beribukota di Krapyak (sekarang Dayeuhkolot), kira-kira 11 kilometer ke arah Selatan dari pusat Kota Bandung sekarang. Ketika Kabupaten Bandung dipimpin oleh Bupati ke-6, yakni R.A. Wiranatakusumah II (1794-1829) yang dijuluki “Dalem Kaun”, kekuasaan di Nusantara beralih dari kompeni kepada Pemerintah Hindia Belanda dengan Gubernur Jenderal pertama Heman Willem Daendels (1808-1811). Untuk kelancaran menjalankan tugasnya di Pulau Jawa, Daendels membangun Jalan Raya Pos (Groote Posweg) dari Anyer di ujung Jawa Barat ke Panarukan di ujung Jawa Timur ( $\pm$  1000 kilometer). Pembangunan jalan raya itu dilakukan oleh rakyat pribumi di bawah pimpinan bupati daerah masing-masing.

Di daerah Bandung khususnya dan daerah Priangan umumnya, Jalan Raya Pos mulai di bangun pertengahan 1808, dengan memperbaiki dan memperlebar jalan yang telah ada. Di daerah Bandung sekarang, jalan raya itu adalah Jalan Jenderal Sudirman – Jalan Asia Afrika – Jalan A. Yani, berlanjut ke Sumedang dan seterusnya. Untuk kelancaran pembangunan jalan raya dan kemudahan pejabat pemerintah kolonial untuk mendatangi kantor bupati, Daendels melalui surat tanggal 25 Mei 1810 meminta Bupati Bandung dan Bupati Parakanmuncang untuk memindahkan Ibukota Kabupaten masing-masing ke daerah Cikapundung dan Andawadak (Tanjungsari) mendekati Jalan Raya Pos.

Rupanya Daendels tidak mengetahui, bahwa jauh sebelum surat itu keluar, Bupati Bandung sudah merencanakan untuk memindahkan Ibukota Kabupaten Bandung, bahkan telah menemukan tempat yang cukup baik dan strategis bagi pusat pemerintahan. Tempat yang dipilih adalah lahan kosong berupa hutan, terletak di tepi Barat Sungai Cikapundung tepi Selatan Jalan Raya Pos yang sedang dibangun (pusat Kota Bandung sekarang). Alasan pemindahan ibukota antara lain, Krapyak tidak strategis sebagai pusat pemerintahan, karena terletak di sisi Selatan daerah Bandung dan sering dilanda banjir saat musim hujan.

Sekitar tahun 1808 atau awal tahun 1809, Bupati beserta sejumlah rakyatnya pindah dari Krapyak mendekati lahan bakal ibukota baru. Mula-mula Bupati tinggal di Cikalintu (daerah Cipaganti), kemudian pindah ke Balubur Hilir, selanjutnya pindah lagi

ke Kampung Bogor (Kebun Kawung, pada lahan Gedung Pakuan Sekarang). Bupati memimpin sejumlah rakyatnya, termasuk penduduk Kampung Balubur Hilir, membuka lahan hutan pada lahan bakal ibukota (daerah Cikapundung Hilir). Tidak diketahui secara pasti berapa lama Kota Bandung di bangun. Akan tetapi, kota itu dibangun bukan atas prakarsa Daendels, melainkan atas prakarsa Bupati Bandung, bahkan pembangunan kota dipimpin langsung oleh Bupati. Dengan kata lain Bupati R.A Wiranatakusumah II adalah pendiri (*The Founding Father*) Kota Bandung. Kota Bandung di resmikan sebagai ibukota baru Kabupaten Bandung dengan besluit (surat kelulusan) tanggal 25 September 1810. Hal ini berarti, selama belum ditemukan sumber lain yang menunjukkan fakta lebih akurat mengenai berdirinya Kota Bandung, maka tanggal 25 September 1810 dapat dipertanggungjawabkan validitasnya sebagai “Hari Jadi Kota Bandung”.

#### 4.1.2 Geografis Kota Bandung

Kota Bandung terletak di wilayah Jawa Barat dan merupakan Ibukota Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Lokasi Kotamadya Bandung cukup strategis. Dilihat dari segi komunikasi, perekonomian maupun keamanan. Secara geografis Kota Bandung terletak diantara  $107^{\circ}36'$  Bujur Timur dan  $6^{\circ}55'$  Lintang Selatan.

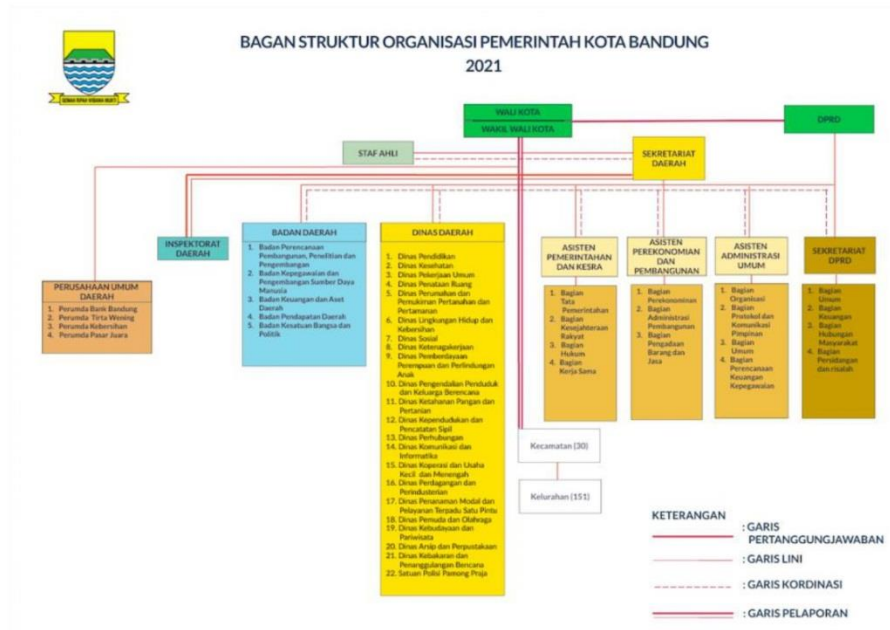
Kota Bandung terletak pada ketinggian 768 meter diatas permukaan laut, titik tertinggi di daerah Utara dengan ketinggian 1.050 meter dan terendah di sebelah Selatan adalah 675 meter diatas permukaan laut. Selain itu, iklim Kota Bandung dipengaruhi oleh iklim pegunungan yang lembab dan sejuk. Selama tahun 2020, suhu rata-rata Kota Bandung adalah  $25,86^{\circ}\text{C}$ . Suhu tertinggi  $33,00^{\circ}\text{C}$  dan suhu terendah  $15,90^{\circ}\text{C}$ . Kota Bandung tertelatak di bagian tengah “Cekungan Bandung” yang mempunyai dimensi luas 233.000 Ha. Secara administratif, cekungan ini tertelatak di lima daerah administrasi Kabupaten/Kota, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan 5 Kecamatan yang termasuk Kabupaten Sumedang.

Kota Bandung memiliki luas mencapai 16.729,65 Ha, perhitungan ini berdasarkan pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. Secara administratif, Kota Bandung berbatasan dengan beberapa daerah Kabupaten/Kota lainnya, yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat;
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Cimahi;
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung; dan
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung.

### 4.1.3 Struktur Organisasi, Tugas Dan Wewenang

#### A. Struktur Organisasi



Sumber: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (2023)

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kota Bandung

#### B. Visi dan Misi Kota Bandung

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin di capai dalam periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus dilaksanakan dalam periode pembangunan daerah. Adapun visi Kota Bandung tahun 2018-2023 yaitu:

**“Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis”**

Pejabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bandung, meliputi seluruh wilayah dan isinya yang artinya Kota Bandung dan seluruh warga yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1810 hingga sekarang.
- Unggul, dengan berbagai pencapaian prestasi yang telah diraih pada periode sebelumnya, maka Kota Bandung akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik di setiap sektor serta tetap menjadi contoh untuk daerah lain dalam bentuk terobosan bagi pembangunan daerah. Dukungan SDM Kota Bandung yang berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya

terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan Kota Bandung.

- c. Nyaman, dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka kualitas infrastruktur yang sudah baik harus terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan dampak terhadap kualitas lingkungan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air dan udara harus terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali dengan ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya yang responsif terhadap berbagai aktivitas dan perilaku penghuninya. Kebutuhan ruang dalam konteks pelaksanaan pembangunan harus tetap berpihak terhadap lingkungan.
- d. Sejahtera, kesejahteraan lahir dan batin yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis individu, keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya meliputi ruhani, akal dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.
- e. Agamis, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, manifestasi dari kesempurnaan kehidupan beragama sebagai wujud menjadi rahmat bagi alam semesta. Terwujudnya masyarakat yang agamis adalah kondisi yang harus hadir sepanjang tahun 2018-2023. Dalam masyarakat yang agamis semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berfikir, bersikap dan berbuat. Ajaran agama tidak hanya dijadikan kegiatan ritual namun juga implementasikan ke dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sosial kemasyarakatan.

Sedangkan, misi merupakan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan misi Kota Bandung yang ditetapkan yaitu:

1. Membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing. Pembangunan Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil dan merata.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien bersih dan melayani. Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui *smart government* yang terintegritasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan prima.

3. Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh dan berkeadilan. Kota Bandung sebagai kota jasa mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga kerja UMKM lokal.
4. Mewujudkan Bandung yang nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan infrastruktur dan penataan ruang secara sinergis dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan, melalui sistem yang inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan.
5. Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi. Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menyelenggarakan pembangunan kota secara partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat dan swasta.

### C. Uraian Tugas

1. Wali Kota, mempunyai tugas diantaranya sebagai berikut:
  - a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD
  - b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
  - c. Menyusun dan mengajukan rancangan pemerintah daerah tentang RPJPD dan RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD
  - d. Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - e. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah
  - f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Wakil Wali Kota, mempunyai tugas diantaranya sebagai berikut:
  - a. Membantu wali kota dalam:
    - Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
    - Mengoordinasikan kegiatan perangkat daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan
    - Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah
  - b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada wali kota dalam pelaksanaan pemerintah daerah
  - c. Melaksanakan tugas dan wewenang wali kota apabila wali kota menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara

- d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - e. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan wali kota yang ditetapkan sebagai keputusan kepala daerah
3. Sekretaris Daerah, mempunyai tugas membantu wali kota dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Dalam pelaksanaan tugas tersebut sekretaris daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
    - a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah
    - b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
    - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
    - d. Pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada instansi daerah
    - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya
  4. Sekretariat DPRD, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dalam pelaksanaan tugas tersebut sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
    - a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
    - b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
    - c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD
    - d. Penyedia dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
  5. Inspektorat Daerah, mempunyai tugas membantu wali kota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu oleh perangkat daerah. Dalam pelaksanaan tugas tersebut inspektorat daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
    - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan
    - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya
    - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan wali kota dan/atau tanpa menunggu penugasan dari wali kota
    - d. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi
    - e. Pelaksanaan pengawasan program reformasi birokrasi
    - f. Penyusunan laporan hasil pengawasan

- g. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah
  - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya
6. Dinas Daerah, mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu yang ditugaskan kepada wali kota. Dalam pelaksanaan tugas tersebut dinas daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
  - b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya
7. Badan Daerah, mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut badan daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
  - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
  - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
  - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya
8. Kecamatan, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyelenggarakan urusan pemerintah umum
  - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
  - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
  - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan wali kota
  - e. Mengoordinasikan pemerliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
  - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
  - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan
  - h. Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

## 4.2 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung

### 4.2.1 Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bandung

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sumber PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (UU No. 33 Tahun 2004). Sebagai sumber utama pembiayaan dan pengeluaran daerah, PAD harus diupayakan agar terus mengalami peningkatan untuk memberikan pelayanan kepada publik yang maksimal. Berikut realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bandung tahun anggaran 2015-2021.

Tabel 4.1 Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015-2021 (dalam Miliar)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pajak Daerah	1.494,15	1.709,81	2.175,08	2.160,15	2.154,63	1.629,19	1.695,12
Retribusi Daerah	64,98	92,00	50,06	69,134	62,47	52,33	30,09
Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	8,60	10,67	11,29	10,77	10,48	13,13	15,78
Lain-Lain PAD yang Sah	291,96	340,28	342,03	331,54	320,676	369,13	454,98
<b>Jumlah PAD</b>	<b>1.859,69</b>	<b>2.152,76</b>	<b>2.578,46</b>	<b>2.571,59</b>	<b>2.548,26</b>	<b>2.063,78</b>	<b>2.195,97</b>

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJP) dan PPID Kota Bandung (data diolah, 2023)

Dari tabel diatas diketahui bahwa pendapatan asli daerah Kota Bandung tahun 2015-2021 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Perolehan PAD paling tinggi bersumber dari pajak daerah, sedangkan perolehan PAD paling rendah bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Untuk mengetahui perkembangan PAD, maka dapat dihitung menggunakan rasio kemampuan keuangan daerah dengan rumus:

$$\text{Rasio Kemampuan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

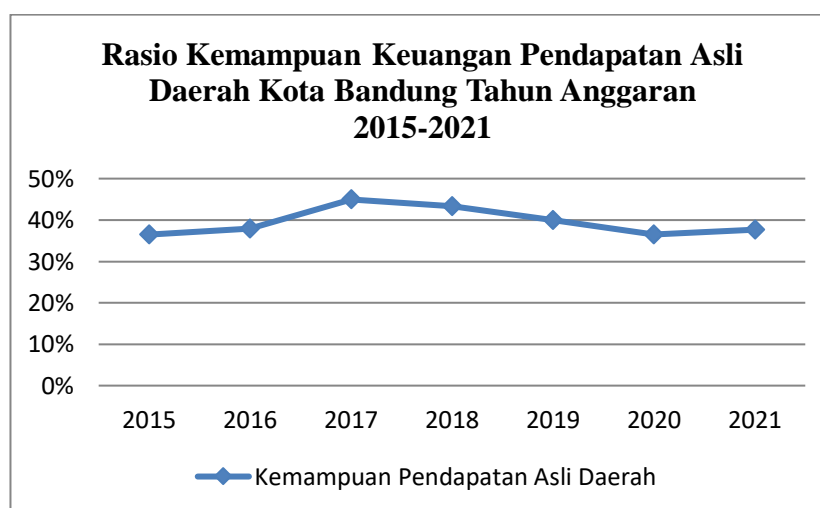
Berdasarkan pada perhitungan tersebut maka diperoleh hasil rasio kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Bandung sebagai berikut:



Tabel 4.2 Rasio Kemampuan Keuangan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015-2021  
(dalam Miliar)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Daerah	Rasio Kemampuan Keuangan Daerah (%)
2015	1.859,69	5.098,07	36,48
2016	2.152,76	5.685,21	37,87
2017	2.578,46	5.735,00	44,96
2018	2.571,59	5.940,00	43,29
2019	2.548,26	6.381,82	39,93
2020	2.063,78	5.643,96	36,57
2021	2.195,97	5.838,24	37,61
<b>Rata-rata</b>			<b>39,53</b>

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan PPID Kota Bandung (data diolah, 2023)



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan PPID Kota Bandung (data diolah, 2023)

Gambar 4.2 Grafik Rasio Kemampuan Keuangan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015-2021

Berdasarkan tabel dan gambar diatas menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah Kota Bandung tahun 2015-2021 yang dihitung menggunakan rasio kemampuan keuangan daerah mengalami perubahan setiap tahunnya. Kemampuan keuangan daerah tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 44,96% dan terendah pada tahun 2015 sebesar 36,48%. Jika dilihat pertahun pertumbuhan kemampuan keuangan daerah tahun 2015 hingga 2017 mengalami peningkatan, sedangkan tiga tahun berikutnya pada 2018 – 2020 mengalami penurunan dan mengalami kenaikan kembali di tahun 2021 menjadi 37,61%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penerimaan pendapatan asli daerah tidak stabil dan perlu adanya upaya untuk mengoptimalkan potensi PAD guna meningkatkan pembangunan di daerah.

#### 4.2.2 Dana Perimbangan Pemerintah Daerah Kota Bandung

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana perimbangan merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari tiga bagian yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Tujuan dari dana perimbangan adalah mengurangi ketimpangan dan kesenjangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun besaran alokasi dana perimbangan pada Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun 2015-2021 sebagai berikut:

Tabel 4.3 Dana Perimbangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015-2021 (dalam Miliar)

Tahun	DBH	DAU	DAK	Dana Perimbangan
2015	173,38	1.574,74	17,71	1.765,83
2016	315,65	1.672,46	455,65	2.443,76
2017	302,06	1.643,08	345,61	2.290,75
2018	321,72	1.643,08	462,44	2.427,24
2019	248,78	1.798,10	437,20	2.484,08
2020	349,16	1.589,63	457,50	2.396,29
2021	427,00	1.566,04	415,03	2.408,07

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan PPID Kota Bandung (data diolah, 2023)

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi dana perimbangan Kota Bandung tahun 2015-2021 mengalami perubahan setiap tahunnya. Dana perimbangan paling besar bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang digunakan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam mendanai kebutuhan daerahnya. Besarnya dana perimbangan menunjukkan tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat, hal ini dapat dilihat dari perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah dengan rumus:

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan pada perhitungan ketergantungan keuangan maka diperoleh hasil sebagai berikut:

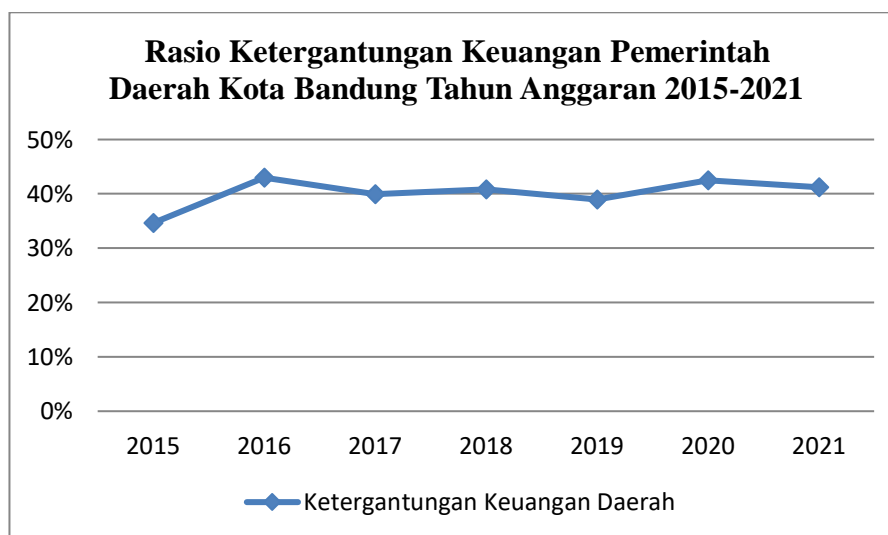
Tabel 4.4 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015-2021 (dalam Miliar)

Tahun	Dana Perimbangan	Pendapatan Daerah	Ketergantungan Keuangan Daerah (%)
2015	1.765,83	5.098,07	34,64

Tahun	Dana Perimbangan	Pendapatan Daerah	Ketergantungan Keuangan Daerah (%)
2016	2.443,76	5.685,21	42,98
2017	2.290,75	5.735,00	39,94
2018	2.427,24	5.940,00	40,86
2019	2.484,08	6.381,82	38,92
2020	2.396,29	5.643,96	42,46
2021	2.408,07	5.838,24	41,25
<b>Rata-rata</b>			<b>40,15</b>

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan PPID Kota Bandung (data diolah, 2023)

Dalam tabel 4.4 menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan keuangan daerah Kota Bandung terhadap Pemerintah Pusat cukup tinggi. Dimana pada tahun 2015 rasio ketergantungan sebesar 34,64% meningkat di tahun 2016 menjadi 42,98%, kemudian menurun hingga 39,94% di tahun 2017. Pada tahun 2018 rasio ketergantungan kembali meningkat sebesar 40,86% dan menurun di tahun 2019 menjadi 38,92%, kemudian terjadi peningkatan kembali di tahun 2020 menjadi 42,46% dan menurun di tahun 2021 menjadi 41,25%. Untuk lebih jelasnya berikut ditampilkan grafik mengenai rasio ketergantungan keuangan daerah Kota Bandung tahun 2015-2021.



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan PPID Kota Bandung (data diolah, 2023)

Gambar 4.3 Grafik Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015-2021

#### 4.2.3 Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Bandung

Belanja modal merupakan pengeluaran yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan berupa peralatan, pembangunan, infrastruktur dan aset tetap lainnya. Untuk mengetahui seberapa besar alokasi belanja modal Kota Bandung tahun 2015-2021 dapat

dihitung menggunakan rasio efektivitas belanja modal dengan membandingkan belanja modal terhadap belanja daerah. Adapun ukuran yang digunakan sebagai berikut:

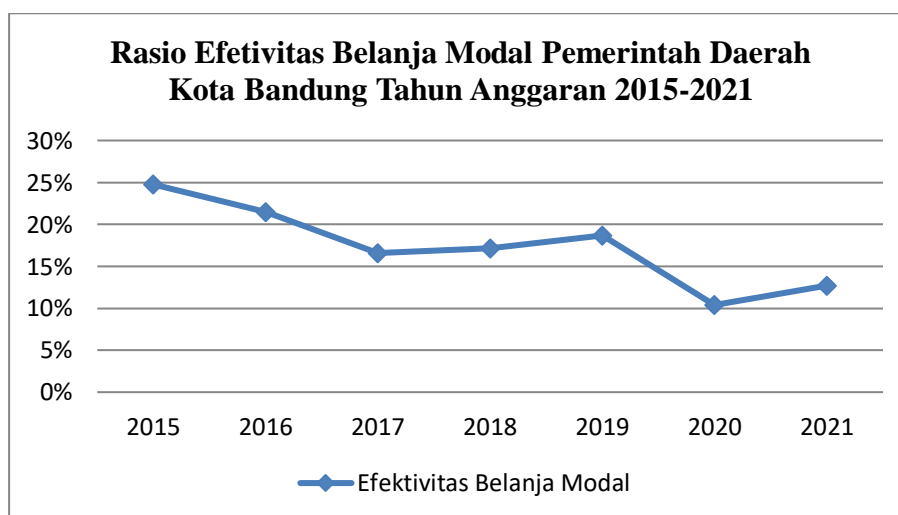
$$\text{Rasio Efektivitas Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh hasil rasio efektivitas belanja modal Pemerintah Daerah Kota Bandung sebagai berikut:

Tabel 4.5 Rasio Efektivitas Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2015-2021 (Dalam Miliar)

Tahun	Belanja Modal	Belanja Daerah	Rasio Efektivitas Belanja Modal (%)
2015	1.287,80	5.201,94	24,76
2016	1.254,02	5.829,51	21,51
2017	918,87	5.540,82	16,58
2018	1.049,70	6.114,45	17,17
2019	1.179,43	6.310,65	18,69
2020	558,48	5.374,02	10,39
2021	721,57	5.675,60	12,71
<b>Rata-rata</b>			<b>17,40</b>

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan PPID Kota Bandung (data diolah, 2023)



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan PPID Kota Bandung (data diolah, 2023)

Gambar 4.4 Grafik Rasio Efektivitas Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015-2021

Dilihat pada grafik diatas bahwa rasio efektivitas belanja modal Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun 2015-2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 rasio efektivitas belanja modal sebesar 24,76% namun mengalami penurunan di dua tahun

berikutnya yang masing-masing sebesar 21,51% dan 16,58%, kemudian meningkat di tahun 2018 dan 2019 sebesar 17,17% dan 18,69%. Selanjutnya di tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup besar menjadi 10,39% lalu meningkat hingga 12,71% di tahun 2021. Adanya penurunan yang besar di tahun 2020 disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang berakibat pada terhambatnya pembangunan infrastruktur daerah.

#### 4.2.4 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan suatu tingkat pencapaian dari hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan selama satu periode tertentu. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan. Dalam penelitian ini kinerja keuangan pemerintah daerah diukur menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah. Menghitung rasio kemandirian keuangan daerah dilakukan dengan cara membandingkan seluruh penerimaan PAD dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh hasil rasio kemandirian keuangan daerah yang menggambarkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung sebagai berikut:

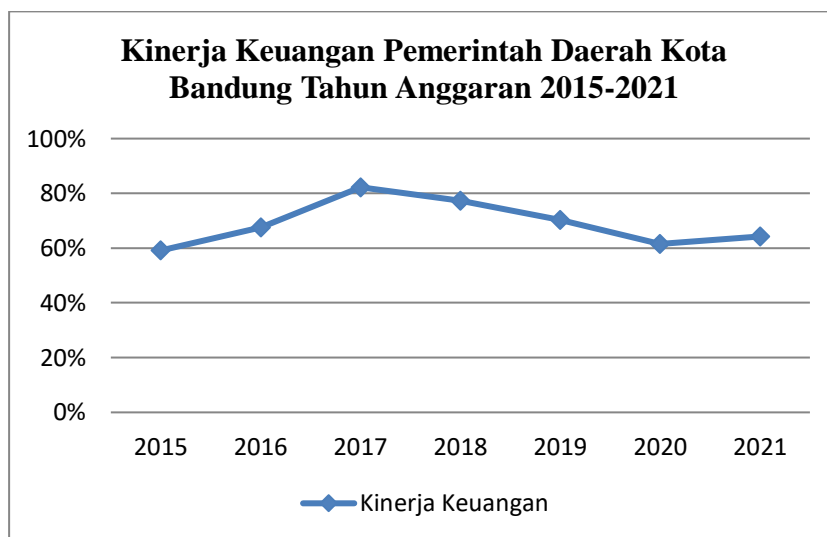
Tabel 4.6 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung  
Tahun Anggaran 2015-2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Kinerja Keuangan (%)
2015	1.859,69	3.144,49	59,14
2016	2.152,76	3.186,71	67,55
2017	2.578,46	3.135,98	82,22
2018	2.571,59	3.324,85	77,34
2019	2.548,26	3.626,14	70,27
2020	2.063,78	3.352,26	61,56
2021	2.195,97	3.417,76	64,25
<b>Rata-rata</b>			<b>68,91</b>

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan PPID Kota Bandung (data diolah, 2023)

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun 2015-2021 yang dihitung menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015, 2016 dan 2017 kinerja keuangan daerah Kota Bandung mengalami peningkatan yang masing-masing sebesar 59,14%, 67,55% dan 82,22% sedangkan tiga tahun berikutnya mengalami penurunan yaitu tahun 2018 sebesar

77,34%, tahun 2019 sebesar 70,27% dan tahun 2020 sebesar 61,56%, lalu mengalami peningkatan kembali di tahun 2021 menjadi 64,25%. Jika dihitung rata-rata tingkat kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung selama 7 tahun sebesar 68,91% dan termasuk kedalam pola hubungan partisipatif yang artinya peran pemerintah pusat semakin berkurang mengingat Pemerintah Daerah Kota Bandung tingkat kemandiriannya mendekati mampu dalam melaksanakan otonomi daerah. Untuk lebih jelasnya berikut Grafik kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2015-2021:



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan PPID Kota Bandung (data diolah, 2023)

Gambar 4.5 Grafik Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015-2021

### 4.3 Analisis Data

Dilakukan analisis data yang terdiri dari Analisis Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Regresi Linier Berganda dan Uji Hipotesis. Pengujian statistik tersebut menggunakan software SPSS 26 dan di peroleh hasil sebagai berikut:

#### 4.3.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis ini dilakukan untuk melihat gambaran data secara umum seperti nilai terendah (Min), tertinggi (Max), rata-rata (Mean) dan standar deviasi dari masing-masing variabel yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Mengenai hasil uji statistik deskriptif penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.7 Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	7	1859,69	2578,46	2281,5014	286,56395
Dana Perimbangan	7	1765,83	2484,08	2316,5743	250,06449
Belanja Modal	7	558,48	1287,80	995,6957	277,16896
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	7	59,14	82,22	68,9043	8,39753
Valid N (listwise)	7				

Sumber: hasil pengolahan SPSS 26 (2023)

Dapat dilihat pada tabel 4.7 bahwa jumlah data penelitian ini sebanyak 7 sampel (N) yaitu periode tahun 2015-2021. Variabel independen yang digunakan yaitu Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Perimbangan (X2) dan Belanja Modal (X3), sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Deskripsi data yang disajikan meliputi nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi variabel penelitian adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil analisis statistik deskriptif variabel pendapatan asli daerah Kota Bandung tahun anggaran 2015-2021 memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 2281,50 atau Rp 2.281,50 miliar dan simpangan baku (*standar deviation*) sebesar 286,56. Nilai minimum adalah sebesar 1859,69 atau Rp 1.859,69 miliar yang diperoleh pada tahun 2015 dan nilai maksimum 2578,46 atau Rp 2.578,46 miliar yang diperoleh pada tahun 2017.

b. Dana Perimbangan

Hasil analisis statistik deskriptif variabel dana perimbangan Kota Bandung tahun anggaran 2015-2021 memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 2.316,57 atau Rp 2.316,57 miliar dan simpangan baku (*standar deviation*) 250,06. Nilai minimum adalah sebesar 1765,83 atau Rp 1.765,83 miliar yang diperoleh pada tahun 2015 dan nilai maksimum 2484,08 atau Rp 2.484,08 miliar yang diperoleh pada tahun 2019.

c. Belanja Modal

Hasil analisis statistik deskriptif variabel belanja modal Kota Bandung tahun anggaran 2015-2021 memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 995,69 atau Rp 995,69 miliar dan simpangan baku (*standar deviation*) sebesar 277,17. Nilai minimum adalah sebesar 558,48 atau Rp 558,48 miliar yang diperoleh tahun 2020 dan nilai maksimum 1287,80 atau Rp 1.287,80 miliar yang diperoleh tahun 2015.

d. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil hasil statistik deskriptif variabel kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun anggaran 2015-2021 memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 68,90 dan simpangan baku (*standar deviation*) 8,40. Nilai minimum sebesar 59,14 yang

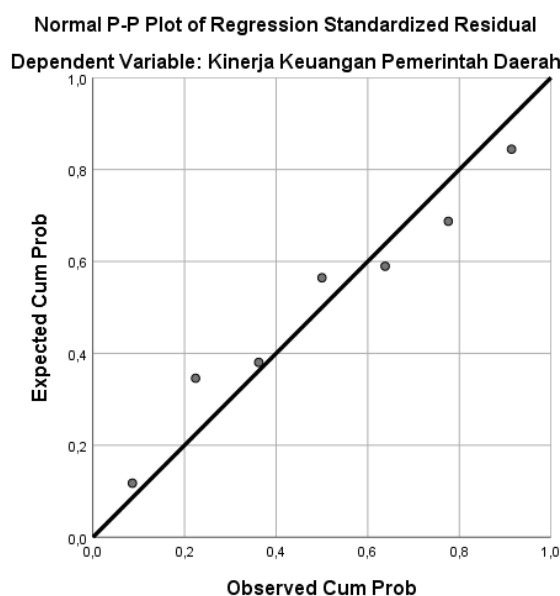
diperoleh pada tahun 2015 dan nilai maksimum sebesar 82,22 yang diperoleh pada tahun 2017.

### 4.3.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi linier berganda harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan statistik dengan uji asumsi klasik, diantaranya yaitu Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heterosdastisitas dan Uji Autokorelasi. Berikut hasil uji asumsi klasik untuk model regresi linier berganda.

#### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Dapat dilakukan dengan dua cara yang pertama melakukan uji plot yaitu model regresi dapat dikatakan normal jika data plotting (titik-titik) menyebar disekitar garis dan mengikuti garis diagonal. Kedua melakukan uji statistik non-parametik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dengan level signifikan 0,05. Apabila nilai signifikan diatas 0,05 maka data berdistribusi normal (Ghozali, 2018) . Berikut hasil pengolahan uji normalitas:



Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 26 (2023)

Gambar 4.6 Hasil Uji Normal Plot

Dengan melihat tampilan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa grafik normal plot menghasilkan plotting (titik-titik) menyebar disekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka model regresi dapat dinyatakan berdistribusi normal. Disisi lain, bahwa hasil uji normalitas dengan grafik dapat sedikit keliru, oleh karena itu untuk memastikan dilakukan uji kembali menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*.



Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		7
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,63800077
Most Extreme Differences	Absolute	,162
	Positive	,102
	Negative	-,162
Test Statistic		,162
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 26 (2023)

Berdasarkan tabel 4.8 uji normalitas *one sample kolmogorov-smirnov* menghasilkan nilai signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed) sebesar  $0,200 > 0,05$  hal ini berarti data residual berdistribusi normal dan hasilnya konsisten dengan uji plot yang telah dilakukan sebelumnya.

## 2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Multikolinieritas dapat dilihat dari Nilai Tolerance dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai *cut off* yang umumnya digunakan untuk menunjukkan tidak adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance  $\geq 0,10$  atau sama dengan nilai  $VIF \leq 10$  (Ghozali, 2018). Berikut hasil pengolahan uji multikolinieritas:

Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Pendapatan Asli Daerah	0,994	1,006
	Dana Perimbangan	0,602	1,661
	Belanja Modal	0,604	1,655
a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah			

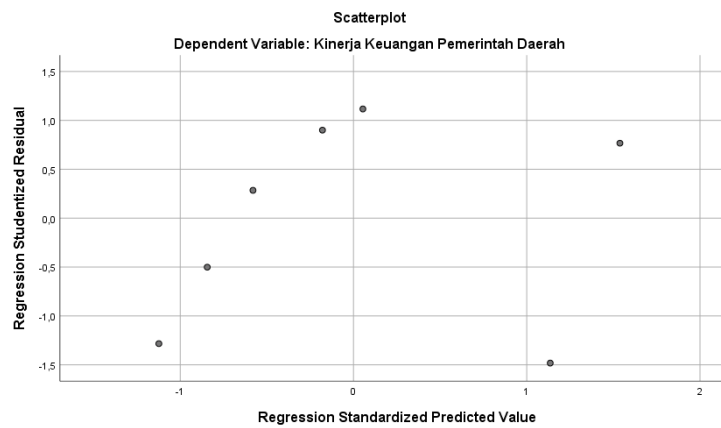
Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 26 (2023)

Dalam tabel 4.9 dapat dilihat hasil perhitungan yang menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 begitupun dengan hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) yang menunjukkan hasil yang sama, tidak adanya variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Maka

dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

### 3. Uji Heterosdastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi kesamaan variace dari residual satu ke pengamatan pengamatan yang lain. Model regresi yang baik tidak terjadi masalah heteroskedastisitas, pengujian dapat dilakukan dengan uji scatterplot dimana model dikatakan bebas dari heteroskedastisitas apabila dalam grafik tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar dan uji glejser dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2018). Berikut hasil pengolahan uji heteroskedastisitas:



Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 26 (2023)

Gambar 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplots

Berdasarkan grafik scatterplot pada gambar 4.7 terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar secara acak baik diatas ataupun dibawah angka 0 dan sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Namun analisis scatterplot memiliki kelemahan yg cukup signifikan karena jumlah pengamatan yang sedikit sulit menginterpretasikan hasil scatterplot. Oleh sebab itu kembali dilakukan uji statistik untuk lebih dapat menjamin hasil yang akurat.

Tabel 4.10 Hasil Uji Glejser

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,564	3,913		-,144	,894
	Pendapatan Asli Daerah	,064	,048	,598	1,328	,276
	Dana Perimbangan	-,035	,075	-,271	-,468	,672
	Belanja Modal	-,004	,043	-,059	-,101	,926

a. Dependent Variable: Res2

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 26 (2023)

Berdasarkan output SPSS pada tabel diatas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung gejala heterosdastisitas.

#### 4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1(sebelumnya). Model regresi yang baik merupakan regresi yang bebas dari autokorelasi dengan pengujian menggunakan uji Run Test untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (Ghozali, 2018). Dapat dikatakan terbebas dari autokorelasi apabila nilai Asymp Sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05. Berikut hasil pengolahan uji autokorelasi:

Tabel 4.11 Hasil Uji Run Test

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	,14646
Cases < Test Value	3
Cases >= Test Value	4
Total Cases	7
Number of Runs	6
Z	,910
Asymp. Sig. (2-tailed)	,363
a. Median	

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 26 (2023)

Berdasarkan tabel 4.11 output SPSS pada uji run test menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 0,363 > 0,05 yang berarti bahwa model regresi terbebas dari gejala autokorelasi.

#### 4.3.3 Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda bertujuan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk melakukan uji regresi linier berganda, terlebih dahulu harus memenuhi uji asumsi klasik seperti diatas. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel bebas yang akan dimasukkan ke dalam persamaan model regresi yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal, sehingga persamaan model regresi linier berganda yang terbentuk adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12 Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-54,970	8,880		-6,190	,008
	Pendapatan Asli Daerah	2,423	,109	,974	22,135	,000
	Dana Perimbangan	,617	,170	,206	3,639	,036
	Belanja Modal	,189	,097	,110	1,953	,146

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 26 (2023)

$$Y = -54,970 (\alpha) + 2,423(\text{PAD}) + 0,617(\text{Daper}) + 0,189 (\text{Belanja Modal})$$

Keterangan:

Y : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

$\alpha$  : Konstanta

X1 : Pendapatan Asli Daerah

X2 : Dana Perimbangan

X3 : Belanja Modal

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  : Koefisien Regresi Variabel Independen

$\varepsilon$  : Error

Dalam tabel 4.12 pada kolom B *Unstandardized Coefficient* persamaan yang terbentuk yaitu  $Y = -54,970 + 2,423 (\text{PAD}) + 0,617 (\text{Dana Perimbangan}) + 0,187 (\text{Belanja Modal})$ . Interpretasi dari hasil persamaan regresi adalah sebagai berikut:

1. Nilai konstanta adalah -54,970. Artinya, jika variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal nilainya adalah nol, maka nilai variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah bernilai negatif sebesar -54,970
2. Nilai koefisien variabel pendapatan asli daerah bernilai positif sebesar 2,423. Artinya setiap kenaikan pendapatan asli daerah sebesar satu-satuan, maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan meningkat sebesar 2,423 dengan asumsi variabel independen lainnya yaitu dana perimbangan dan belanja modal dalam model regresi ini bernilai nol. Koefisien bertanda positif menunjukkan jika pendapatan asli daerah bernilai positif maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan naik.

3. Nilai koefisien variabel dana perimbangan bernilai positif 0,617. Artinya setiap kenaikan dana perimbangan sebesar satu-satuan, maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan meningkat sebesar 0,617 dengan asumsi variabel independen lainnya yaitu pendapatan asli daerah dan belanja modal dalam model regresi ini bernilai nol. Koefisien bertanda positif menunjukkan jika dana perimbangan bernilai positif maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan naik.
4. Nilai koefisien variabel belanja modal bernilai positif 0,187. Artinya setiap kenaikan belanja modal sebesar satu-satuan, maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan meningkat sebesar 0,187 dengan asumsi variabel dependen lainnya yaitu pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dalam model regresi ini bernilai nol. Koefisien bertanda positif menunjukkan jika belanja modal bernilai positif maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan naik.

#### 4.3.4 Uji Hipotesis

##### 1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual menerangkan variasi variabel dependen. Dalam pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Berikut hasil uji koefisien regresi secara parsial di dalam penelitian ini:

TABEL 4.13 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-54,970	8,880		-6,190	,008		
	Pendapatan Asli Daerah	2,423	,109	,974	22,135	,000	,994	1,006
	Dana Perimbangan	,617	,170	,206	3,639	,036	,602	1,661
	Belanja Modal	,189	,097	,110	1,953	,146	,604	1,655

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 26 (2023)

Berdasarkan tabel 4.13 hasil uji signifikansi parameter individual (uji t), yaitu sebagai berikut:

- a. Pendapatan asli daerah memiliki nilai sig. 0,000 dan  $t_{hitung}$  sebesar 22,135. Artinya nilai sig  $< 0,05$  ( $0,000 < 0,05$ ) dan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $22,135 > 3,182$ ), maka  $H_{01}$  ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis pertama ( $H_1$ ) diterima.

- b. Dana perimbangan memiliki nilai sig. 0,036 dan  $t_{hitung}$  sebesar 3,639. Artinya nilai sig  $< 0,05$  ( $0,036 < 0,05$ ) dan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $3,639 > 3,182$ ), maka  $H_0_2$  ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dana perimbangan secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis kedua ( $H_2$ ) diterima.
- c. Belanja modal memiliki nilai sig. 0,146 dan  $t_{hitung}$  1,953. Artinya nilai sig  $> 0,05$  dan nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $1,953 < 3,182$ ), maka  $H_0_3$  diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel belanja modal secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis ketiga ( $H_3$ ) ditolak.

## 2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini uji statistik F menggunakan nilai sig 0,05. Berikut hasil uji simultan (uji F) sebagai berikut:

Tabel 4.14 Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA <sup>a</sup>						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	420,669	3	140,223	172,245	,001 <sup>b</sup>
	Residual	2,442	3	,814		
	Total	423,111	6			
a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah						
b. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan						

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 26 (2023)

Berdasarkan tabel 4.14 bahwa hasil perhitungan uji signifikansi simultan (Uji F) memiliki nilai sig. Sebesar 0,001 dan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 172,245. Artinya nilai sig.  $< 0,05$  ( $0,001 < 0,05$ ) dan nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $172,245 > 9,28$ ), maka  $H_0$  ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama (simultan) yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis keempat ( $H_4$ ) diterima.

## 3. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai  $R^2$  mendekati satu berarti variabel-variabel independen mampu memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Berikut merupakan hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) di dalam penelitian ini:

Tabel 4.15 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,997 <sup>a</sup>	,994	,988	,90227
a. Predictors: (Constant), Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan				

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 26 (2023)

Hasil tabel 4.15 yang menampilkan output SPSS model summary bahwa besarnya nilai *Adjusted R Square* 0,988 ini menunjukkan sebesar 98,8% variasi kinerja keuangan pemerintah daerah dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal, sedangkan sisanya (100% - 98,8% = 1,2%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model penelitian ini.

#### 4.4 Pembahasan Dan Interpretasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung, maka interpretasi hasil penelitian sebagai berikut:

##### 4.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung

Berdasarkan tabel 4.1 realisasi pendapatan asli daerah menunjukkan perubahan setiap tahunnya dan dilihat dari hasil perhitungan rasio kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Bandung dari tahun 2015-2021 memiliki tingkat rata-rata sebesar 39,53% yang mencerminkan kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai kegiatan pemerintahannya.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengujian statistik (uji-t) diketahui bahwa terdapat pengaruh antara variabel pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut dilihat dari tabel 4.13 yang menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah ( $X_1$ ) memiliki nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$  dan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $22,135 > 3,182$ , sehingga dapat dinyatakan pada penelitian ini bahwa pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun anggaran 2015-2021. Adanya pengaruh antara pendapatan asli daerah dengan kinerja keuangan pemerintah daerah memberikan arti bahwa semakin besar pendapatan asli daerah, maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bandung tahun 2015-2021. Besarnya pendapatan asli daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi serta berkontribusi terhadap

pertumbuhan pendapatan dan pembangunan di daerah yang nantinya akan berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Antari dan Sedana (2018) dan Ekasuryana (2018) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

#### **4.4.2 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung**

Dana perimbangan merupakan bagian dari pendapatan daerah yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan tabel 4.3 realisasi dana perimbangan mengalami fluktuasi selama tahun 2015-2021 dan jika dilihat dari hasil perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah pada tabel 4.4 Pemerintah Kota Bandung memiliki rata-rata sebesar 40,15% yang mencerminkan tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pendanaan dari pemerintah pusat.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengujian statistik (uji-t) dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh antara variabel dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut diketahui dari data pada tabel 4.13 yang menunjukkan bahwa variabel dana perimbangan ( $X_2$ ) memiliki nilai signifikan sebesar  $0,036 < 0,05$  dan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $3,639 > 3,182$ . Pada penelitian ini dapat dinyatakan bahwa dana perimbangan secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bandung tahun anggaran 2015-2021.

Adanya pengaruh antara dana perimbangan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah memberikan arti bahwa semakin besar dana perimbangan, maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bandung tahun 2015-2021. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa semakin besar dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat maka semakin besar pula anggaran yang dikelola pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan yang tinggi dan mampu meningkatkan pelayanan kepada publik sehingga berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin baik. Namun, disisi lain besarnya dana perimbangan yang diterima menunjukkan tingginya tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah Kota Bandung terhadap pemerintah pusat

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wahyudin dan Hastuti (2020) menyatakan bahwa dana perimbangan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, namun berbeda hasil penelitian yang dilakukan oleh Saleh, R. (2020) dan Sari (2020) yang menyakan bahwa dana perimbangan tidak berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.



#### **4.4.3 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung**

Berdasarkan tabel 4.5 bahwa hasil perhitungan rasio efektivitas belanja modal Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun 2015-2021 mengalami fluktuasi, secara rata-rata rasio efektivitas Pemerintah Kota Bandung sebesar 17,40% yang mencerminkan masih rendahnya pengalokasikan belanja daerah kedalam investasi belanja modal karena pemerintah masih memprioritaskan kebutuhan lain diluar belanja modal.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengujian statistik (uji-t) pada tabel 4.13 yang menunjukkan bahwa variabel belanja modal (X3) memiliki nilai signifikan sebesar  $0,146 > 0,05$  dan  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $1,953 < 3,182$ , sehingga dapat dinyatakan pada penelitian ini bahwa belanja modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bandung tahun anggaran 2015-2021. Hal ini dikarenakan pemerintah belum cukup baik dalam penyerapan alokasi anggaran belanja modal di daerah, sehingga tidak mampu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bandung.

Penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi, 2018) bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Aji (2020) dan Ariska (2021).

#### **4.4.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung**

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh antara variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut diketahui dari data pada tabel 4.14 yang menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,001 < 0,05$  dan nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu  $172,245 > 9,28$ . Maka hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Bandung tahun anggaran 2015-2021.

Selain itu berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.15 diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,988. Artinya bahwa 98,8% variasi kinerja keuangan pemerintah daerah dijelaskan oleh variasi dari tiga variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal. Sedangkan, sisanya sebesar  $(100\% - 98,8\% = 1,2\%)$  dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model penelitian ini.

Adanya pengaruh antara pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal dengan kinerja keuangan pemerintah daerah memberikan arti bahwa semakin meningkatnya PAD, dana perimbangan dan belanja modal, maka semakin baik kinerja

keuangan pemerintah daerah. Hal ini karena ketiga variabel tersebut memiliki peranan yang besar sebagai sumber pembiayaan daerah yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin baik.

Penelitian ini sejalan pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2018) dan Wahyudin dan Hastuti (2020) bahwa pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Penelitian ini menguji Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015-2021. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun anggaran 2015-2021. Hal tersebut dapat diketahui dari nilai signifikan variabel pendapatan asli daerah yang lebih kecil dari taraf nyata 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) dan nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $22,135 > 3,182$ ). Maka dapat disimpulkan dari hasil penelitian tersebut bahwa Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan Kota Bandung mampu berkontribusi terhadap pendapatan dan pembangunan daerah, sehingga berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin baik.
2. Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun anggaran 2015-2021. Hal tersebut dapat diketahui dari nilai signifikan variabel dana perimbangan yang lebih kecil dari taraf nyata 0,05 ( $0,036 < 0,05$ ) dan nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $3,639 > 3,182$ ). Maka dapat disimpulkan dari hasil penelitian tersebut bahwa dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat mampu dikelola dengan baik sehingga mampu meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung.
3. Belanja Modal secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun anggaran 2015-2021. Hal tersebut dapat diketahui dari nilai signifikan variabel belanja modal yang lebih besar dari taraf nyata 0,05 ( $0,146 > 0,05$ ) dan  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$  ( $1,953 > 3,182$ ). Maka dapat disimpulkan dari hasil penelitian tersebut bahwa belanja modal yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kota Bandung belum mampu berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.
4. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung tahun anggaran 2015-2021. Hal tersebut dapat diketahui dari nilai signifikan lebih kecil dari taraf nyata 0,05 ( $0,001 < 0,05$ ) dan  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$  ( $172,245 > 9,28$ ). Maka dapat disimpulkan dari hasil penelitian tersebut bahwa seluruh variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal jika dialokasikan secara bersama-sama memiliki

kontribusi terhadap pembangunan daerah sehingga membuat kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik.

## **5.2 Saran**

Adapun saran yang dapat disampaikan dengan permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

### **5.2.1 Kegunaan Praktis**

- Pemerintah Daerah Kota Bandung selaku yang berwenang dalam mengelola keuangan daerah diharapkan dapat mempertahankan sekaligus meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pajak dan retribusi daerah, sehingga nantinya mampu membiayai kegiatan pemerintahannya sendiri.
- Pemerintah Daerah Kota Bandung perlu untuk mengurangi penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat agar tingkat ketergantungan keuangan daerah dapat menurun.
- Pemerintah Daerah Kota Bandung perlu meningkatkan alokasi belanja modal terhadap total belanja daerah dan alokasi belanja daerah perlu dialokasikan secara efisien dengan menerapkan transparansi sehingga mampu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

### **5.2.2 Kegunaan Akademis**

- Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat meninjau variabel independen lainnya selain yang digunakan pada penelitian ini baik berupa faktor keuangan ataupun non keuangan agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih sempurna.
- Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan rasio lain selain kemandirian keuangan daerah dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah diantaranya adalah rasio pertumbuhan, rasio desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan, rasio efektivitas dan rasio efisiensi.
- Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meninjau kinerja keuangan untuk daerah ataupun provinsi lainnya mengingat terdapat 38 Provinsi yang ada di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antari, S., dan Sedana, P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Unud* [Online] Vol. 7 (2), pp. 1080-1110. Tersedia di: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Manajemen/article/view/35806> [Diakses pada 07 November 2022].
- Ariska, R. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi. Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara.
- Bastian, I. (2017). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Edisi 3. Jakarta: Erlangga.
- Budianto dan Alexander, S. (2016). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA* [Online] Vol. 4 (4) pp. 844-851. Tersedia di: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/14511/14084> [Diakses 13 November 2022].
- Candra, D., Ratnawati, V., dan Mutia, Y. (2019). Analisis Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Perbandingan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. *E-Jurnal Ekonomi* [Online] Vol. 27 (2), pp. 146-159. Tersedia di: <https://je.ejournal.unri.ac.id/index.php/JE/article/view/7901> [Diakses pada 13 Februari 2023].
- Damara, D., Sudarmanto, E., dan Mulyaningsih, M. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019*. Skripsi. Universitas Pakuan Bogor.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2022). *Data Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2015-2021*. Jakarta.
- Ekasuryana, I., Hardiyanto, A., dan Herlisnawati, D. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor*. Skripsi. Universitas Pakuan Bogor.
- Fazlurahman, F., Fatriananda, C., dan Jauhari, R. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung Sebelum Dan Setelah Mendapatkan Opini WTP Dari

- BPK. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*. Vol. 11 (1), pp 56-62. Tersedia di: <http://ejournal.uigm.ac.id/index.php/EGMK/article/view/1062> [Diakses pada 13 November 2022].
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi kesembilan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasanah, N., dan Fauziah, A. (2017). *Akuntansi Pemerintahan*. Bogor: Penerbit In Media.
- Jauhariah, M., Sudarmanto, E., dan Surono, S. (2022). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2014-2021*. Skripsi. Universitas Pakuan Bogor.
- Khusaini. (2018). *Keuangan Daerah*. Malang; UB Press.
- Mahsun, Mohamad. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. BPFE, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Penjabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi. (2022). *Laporan Keuangan Tahun 2015-2021*. Bandung.
- Prastiwi, N., dan Aji, A. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Kajian Bisnis* [Online]. Vol. 28 (1), Pp. 89-105. Tersedia Di <https://jurnal.stieww.ac.id/index.php/jkb/article/view/45> [Diakses Pada 07 November 2022].
- Pratiwi, T. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Putri, N., dan Damayanti, N. (2019). Pengaruh PAD Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen*. Vol. 8 (5), Pp 2834-2861. Tersedia Di: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/manajemen/article/view/44688/29194> [Diakses Pada 07 November 2022].

Republik Indonesia. *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008 Tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal.*

\_\_\_\_\_, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

\_\_\_\_\_, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.*

\_\_\_\_\_, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran.*

\_\_\_\_\_, *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*

\_\_\_\_\_, *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.*

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.*

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.*

Saleh, R. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik*. Vol. 15 (2), Pp 111-134. Tersedia Di:  
<https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/index.php/jipak/article/view/6226> [Diakses Pada 10 November 2022].

Sari, N., Nainggolan, B., Purba, R., Saragih, T., dan Banjarnahor, W. (2020). Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan. *Costing; Journal Of Economic, Business And Accounting* [Online]. Vol. 4 (1), Pp. 219-223. Tersedia di:  
<https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/article/view/1547> [Diakses pada 07 November 2022].

- Susilowati, I., Retnowulan, J., dan Widiyanti, W. (2018). Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Periode Tahun 2012-2016. *Widya Cipta*. Vol. 2 (2), Pp 193-200. Tersedia di: <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/widyacipta/article/view/4297> [Diakses pada 10 November 2022].
- Wahyudin, I., dan Hastuti. (2020) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal* [Online]. Vol. 1 (1), Pp. 86-97. Tersedia di: <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/iarj/article/view/2364> [Diakses pada 08 November 2022].



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mega Harun Utami

Alamat : Kp. Curug 003/003 No. 56, Kelurahan Curug Kec. Bogor Barat Kota Bogor 16113

Tempat dan Tanggal Lahir : Bogor, 02 Oktober 2000

Agama : Islam

Pendidikan

- SD : SDN Curug 1
- SMP : SMP Negeri 16 Bogor
- SMK : SMK PGRI 1 Bogor
- Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan Bogor

Bogor, Mei 2023


Peneliti



Mega Harun Utami

# LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015-2016

 <b>PEMERINTAH KOTA BANDUNG</b> <b>LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA</b> <b>UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR S.D. 31 DESEMBER 2016</b>						
URAIAN	CTT.	ANGGARAN 2016 (Rp)	REALISASI 2016 (Rp)	(%)	REALISASI 2015 (Rp)	
<b>1 PENDAPATAN</b>						
<b>2 PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	5.1.4.1					
3 Pendapatan Pajak Daerah	5.1.4.1.a	2,186,416,770,000.00	1,709,807,582,556.00	78.20	1,494,147,377,063.00	
4 Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.4.1.b	204,770,058,000.00	92,006,779,460.00	44.93	64,985,847,830.00	
5 Pend. Hasil Pengelol. Kek. Daerah yg Dipisahkan	5.1.4.1.c	20,000,000,000.00	10,658,411,624.00	53.29	8,602,757,430.00	
6 Lain-lain Pend. Asli Daerah yang Sah	5.1.4.1.d	356,216,075,364.00	340,282,931,322.00	95.53	291,958,661,192.00	
7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)		2,767,404,903,364.00	2,152,755,704,962.00	77.79	1,859,694,643,505.00	
<b>8</b>						
<b>9 PENDAPATAN TRANSFER</b>	5.1.4.2					
<b>10 TRANSFER PEM. PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>	5.1.4.2.a					
11 Dana Bagi Hasil Pajak		270,489,172,000.00	293,628,719,200.00	108.55	151,312,813,000.00	
12 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)		20,733,293,000.00	22,024,549,634.00	106.23	22,071,782,066.00	
13 Dana Alokasi Umum		1,672,456,589,000.00	1,672,456,589,000.00	100.00	1,574,737,891,000.00	
14 Dana Alokasi Khusus		822,262,082,000.00	455,654,078,000.00	55.41	17,709,340,000.00	
15 Jml. Pend. Transfer D. Perimbangan (11 s/d 14)		2,785,941,136,000.00	2,443,763,935,834.00	87.72	1,765,831,826,066.00	
<b>16</b>						
<b>17 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>	5.1.4.2.b					
18 Dana Otonomi Khusus		0.00	0.00	0.00	0.00	
19 Dana Penyesuaian		0.00	0.00	0.00	629,172,608,000.00	
20 Jml. Pend. Transfer Pem. Pusat Lainnya (18 s/d 19)		0.00	0.00	0.00	629,172,608,000.00	
<b>21</b>						
<b>22 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>	5.1.4.2.c					
23 Pendapatan Bagi Hasil Pajak		770,176,902,811.00	742,941,917,490.00	96.46	749,482,420,357.00	
24 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0.00	0.00	0.00	0.00	
25 Jml. Pend. Transfer Pem. Provinsi (23 s/d 24)		770,176,902,811.00	742,941,917,490.00	96.46	749,482,420,357.00	
26 Total Pendapatan Transfer (15+20+25)		3,556,118,038,811.00	3,186,705,853,324.00	89.61	3,144,486,854,423.00	
<b>27</b>						
<b>28 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	5.1.4.3					
29 Pendapatan Hibah		270,230,302,000.00	269,620,301,234.00	99.77	8,551,912,000.00	
30 Pendapatan Lainnya		90,376,373,209.00	76,132,000,409.00	84.24	85,338,508,920.00	
31 Jumlah Lain-2 Pend. yang Sah (29 s/d 30)		360,606,675,209.00	345,752,301,643.00	95.88	93,890,418,920.00	
32 JUMLAH PENDAPATAN (7+26+31)		6,684,129,617,384.00	5,685,213,859,829.00	85.06	5,098,071,916,848.00	
<b>33</b>						
<b>34 BELANJA</b>						
<b>35 BELANJA OPERASI</b>	5.1.4.4					
36 Belanja Pegawai		2,922,171,815,862.00	2,540,344,665,184.00	86.93	2,381,935,235,484.00	
37 Belanja Barang		2,138,060,453,431.47	1,755,341,609,077.00	82.41	1,288,180,584,635.00	
38 Belanja Bunga		0.00	0.00	0.00	0.00	
39 Belanja Subsidi		130,336,000,000.00	128,532,390,000.00	98.62	116,260,455,000.00	
40 Belanja Hibah		154,104,717,000.00	151,250,782,000.00	98.15	126,741,369,485.00	
41 Belanja Bantuan Sosial		0.00	0.00	0.00	0.00	
42 Jumlah Belanja Operasi (36 s.d. 41)		5,336,672,986,293.47	4,575,469,448,261.00	85.74	3,913,117,644,604.00	
<b>43</b>						
<b>44 BELANJA MODAL</b>	5.1.4.5					
45 Belanja Tanah		283,462,348,500.00	47,423,634,211.00	16.73	105,999,490,000.00	
46 Belanja Peralatan dan Mesin		396,450,740,249.53	330,091,333,540.00	83.26	382,115,607,127.00	
47 Belanja Gedung dan Bangunan		465,791,570,149.00	300,049,202,658.00	64.42	285,777,877,939.00	
48 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		752,031,063,561.00	505,407,567,194.00	67.21	479,379,967,515.00	
49 Belanja Aset Tetap Lainnya		97,832,428,406.00	71,050,047,660.00	72.62	34,528,885,230.00	
50 Jumlah Belanja Modal (45 s.d. 49)		1,995,568,170,865.53	1,254,021,785,263.00	62.84	1,297,802,627,811.00	
<b>51</b>						

LAMPIRAN 2 Lanjutan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015-2016

	URAIAN	CTT.	ANGGARAN 2016 (Rp)	REALISASI 2016 (Rp)	(%)	REALISASI 2015 (Rp)
52	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.4.6				
53	Belanja Tak Terduga		27,607,311,863.00	21,746,900.00	0.08	116,993,530.00
54	Jumlah Belanja Tak Terduga (53 s.d. 53)		27,607,311,863.00	21,746,900.00	0.08	116,993,530.00
55	TOTAL BELANJA (42+50+53)		7,359,848,469,022.00	5,829,512,978,424.00	79.21	5,201,037,465,945.00
56						
57	TRANSFER	5.1.4.7				
58	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA					
59	Bagi Hasil Pajak		0.00	0.00	0.00	0.00
60	Bagi Hasil Retribusi		0.00	0.00	0.00	0.00
61	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0.00	0.00	0.00	0.00
62	JUMLAH TRANSFER BH. KE DESA (59 s.d. 61)		0.00	0.00	0.00	0.00
63						
64	TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN					
65	Bantuan Keu. ke Pemerintah Daerah Lainnya		0.00	0.00	0.00	0.00
66	Bantuan Keuangan Lainnya		1,000,000,000.00	900,741,220.00	90.07	900,741,220.00
67	JUMLAH BANTUAN KEUANGAN (65 s.d. 66)		1,000,000,000.00	900,741,220.00	0.00	900,741,220.00
68	JUMLAH TRANSFER (62 + 67)		1,000,000,000.00	900,741,220.00		900,741,220.00
69	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER (55 + 68)		7,360,848,469,022.00	5,830,413,719,644.00	79.21	5,201,938,207,165.00
70						
71	SURPLUS / DEFISIT (32-69)		(676,718,851,638.00)	(145,199,859,715.00)	21.46	(103,866,290,317.00)
72						
73	PEMBIAYAAN	5.1.4.8				
74						
75	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH					
76	Penggunaan SILPA		994,140,890,638.00	994,140,890,638.00	100.00	1,213,007,180,955.00
77	Pencairan Dana Cadangan		0.00	0.00	0.00	0.00
78	Hasil Penjualan Kek. Daerah yang Dipisahkan		0.00	0.00	0.00	0.00
79	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		0.00	0.00	0.00	0.00
80	Jumlah Pen. Pembiayaan Daerah (76 s/d 79)		994,140,890,638.00	994,140,890,638.00	100.00	1,213,007,180,955.00
81						
82	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH					
83	Pembentukan Dana Cadangan		0.00	0.00	0.00	0.00
84	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		317,422,039,000.00	316,812,038,234.00	99.81	115,000,000,000.00
85	Pembayaran Pokok Pinjaman		0.00	0.00	0.00	0.00
86	Jumlah Pengel. Pembiayaan Daerah (83 s.d. 85)		317,422,039,000.00	316,812,038,234.00	99.81	115,000,000,000.00
87	PEMBIAYAAN NETO (80-86)		676,718,851,638.00	677,328,852,404.00	100.09	1,098,007,180,955.00
88						
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (71+87)		0.00	532,128,992,689.00		994,140,890,638.00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan





LAMPIRAN 3 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bandung Tahun 2016-2017



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR S.D. 31 DESEMBER 2017**

	URAIAN	CTT.	ANGGARAN 2017 (Rp)	REALISASI 2017 (Rp)	%	REALISASI 2016 (Rp)
1	<b>PENDAPATAN - LRA</b>					
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA</b>	5.1.4.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.1.4.1.a	2.400.097.139.060,00	2.175.094.126.326,00	90,52	1.709.807.582.556,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5.1.4.1.b	282.678.023.345,00	60.064.557.334,00	19,06	92.006.779.460,00
5	Pend. Hasil Pengelol. Kek. Daerah yg Dipisahkan -	5.1.4.1.c	20.000.000.000,00	11.279.072.122,00	56,40	10.688.411.624,00
6	Lain-lain PAD yang Sah - LRA	5.1.4.1.d	333.061.427.397,00	342.029.655.103,00	102,69	340.282.931.322,00
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)		3.015.836.590.302,00	2.578.457.420.885,00	85,50	2.152.765.704.962,00
8						
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LRA</b>	5.1.4.2				
10	<b>TRANSFER PEM. PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>	5.1.4.2.a				
11	Dana Bagi Hasil Pajak - LRA		326.476.768.000,00	276.473.974.567,00	84,38	293.626.719.200,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LRA		22.797.990.000,00	26.593.543.094,00	116,65	22.024.549.634,00
13	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA		1.643.076.905.000,00	1.643.076.905.000,00	100,00	1.672.456.589.000,00
14	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA		423.866.195.000,00	345.608.315.944,00	81,54	455.654.078.000,00
15	Jml. Pend. Transfer D. Perimbangan (11 s/d 14)		2.416.217.862.000,00	2.290.752.638.595,00	94,81	2.443.763.935.834,00
16						
17	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA - LRA</b>	5.1.4.2.b				
18	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dana Penyesuaian		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Jml. Pend. Transfer Pem. Pusat Lainnya (18 s/d 19)		0,00	0,00	0,00	0,00
21						
22	<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI - LRA</b>	5.1.4.2.c				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA		798.129.052.780,00	795.519.486.817,00	99,42	742.941.917.490,00
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LRA		0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jml. Pend. Transfer Pem. Provinsi (23 s/d 24)		798.129.052.780,00	795.519.486.817,00	99,42	742.941.917.490,00
26						
27	<b>BANTUAN KEUANGAN</b>					
28	Bantuan Keuangan dari Pemprov. Jawa Barat		88.852.188.000,00	59.704.102.791,00	67,19	76.132.000.409,00
29	Jml. Bantuan Keuangan Provinsi (28 s/d 28)		88.852.188.000,00	59.704.102.791,00	67,19	76.132.000.409,00
30	Total Pendapatan Transfer (15+20+25+29)		3.303.199.162.780,00	3.136.976.228.203,00	94,94	3.262.837.853.733,00
31						
32	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	5.1.4.3				
33	Pendapatan Hibah		26.510.000.000,00	20.573.000.000,00	77,60	269.620.301.234,00
34	Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
35	Jumlah Lain-lain Pend. yang Sah (33 s/d 34)		26.510.000.000,00	20.573.000.000,00	77,60	269.620.301.234,00
36	JUMLAH PENDAPATAN (7+30+35)		6.345.545.693.082,00	5.735.006.949.088,00	90,38	5.683.213.859.929,00
37						
38	<b>BELANJA</b>					
39	<b>BELANJA OPERASI</b>	5.1.4.4				
40	Belanja Pegawai		2.428.740.542.799,11	2.337.929.555.095,00	96,28	2.540.344.695.194,00
41	Belanja Barang		2.505.954.398.749,15	1.933.460.214.462,75	77,15	1.756.341.609.077,00
42	Belanja Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
43	Belanja Subsidi		4.892.726.000,00	0,00	0,00	128.532.390.000,00
44	Belanja Hibah		380.964.018.315,00	350.206.704.601,00	91,93	151.250.782.000,00
45	Belanja Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00	0,00
46	Jumlah Belanja Operasi (40 s.d. 45)		5.320.251.685.853,26	4.621.598.474.148,75	86,87	4.576.469.446.281,00
47						
48	<b>BELANJA MODAL</b>	5.1.4.5				
49	Belanja Tanah		60.862.748.193,41	20.658.299.972,00	33,94	47.423.634.211,00
50	Belanja Peralatan dan Mesin		318.128.762.278,91	236.269.919.381,00	74,27	330.091.333.540,00
51	Belanja Gedung dan Bangunan		533.031.773.881,27	332.847.688.063,00	62,44	300.049.202.658,00
52	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		408.025.056.323,83	295.703.382.542,00	72,47	605.407.857.194,00
53	Belanja Aset Tetap Lainnya		100.214.659.270,22	73.395.786.011,00	73,24	71.050.047.860,00
54	Jumlah Belanja Modal (49 s.d. 53)		1.420.262.959.917,74	918.878.019.069,00	64,70	1.254.021.785.263,00
55						
56	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	5.1.4.6				
57	Belanja Tak Terduga		11.400.000.000,00	346.875.625,00	3,03	21.746.900,00
58	Jumlah Belanja Tak Terduga (57 s.d. 57)		11.400.000.000,00	346.875.625,00	3,03	21.746.900,00
59	TOTAL BELANJA (46+54+58)		6.751.914.685.771,00	5.540.817.365.842,75	82,06	6.829.512.978.424,00
60						
61	<b>TRANSFER</b>	5.1.4.7				
62	<b>TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA</b>					
63	Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00	0,00	0,00
64	Bagi Hasil Retribusi		0,00	0,00	0,00	0,00
65	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
66	Jumlah Transfer BH. KE DESA (63 s.d. 65)		0,00	0,00	0,00	0,00
67						
68	<b>TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN</b>					
69	Bantuan Keu. ke Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
70	Bantuan Keuangan Lainnya		1.000.000.000,00	900.741.220,00	90,07	900.741.220,00
71	Jumlah Bantuan Keuangan (69 s.d. 70)		1.000.000.000,00	900.741.220,00	90,07	900.741.220,00
72	Jumlah Transfer (66 + 70)		1.000.000.000,00	900.741.220,00	90,07	900.741.220,00
73	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER (59 + 72)		6.782.914.685.771,00	5.541.718.107.062,75	81,71	6.830.413.719.644,00
74						
75	<b>SURPLUS / DEFISIT (36 - 73)</b>		(407.368.992.689,00)	193.288.542.025,25		(145.199.859.715,00)
76						
77	<b>PEMBIAYAAN</b>	5.1.4.8				
78						
79	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>					

## LAMPIRAN 4 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bandung Tahun 2018

FO3      Kota Bandung

LRA2018\_10092020-Website-1

			FO	FP
			167	168
			Kota Bandung	Kota Bekasi
			Perda	Audited
Kode Akun	Uraian			
4		Pendapatan Daerah	5.939.997.423.418	4.835.980.257.174
4 1		Pendapatan Asli Daerah	2.571.591.786.199	2.001.150.459.494
4 1 1		Hasil Pajak Daerah	2.160.150.277.316	1.580.754.200.591
4 1 2		Hasil Retribusi Daerah	69.134.407.113	77.320.468.209
4 1 3		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.771.957.542	12.086.694.279
4 1 4		Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	331.535.144.228	330.989.096.415
4 2		Dana Perimbangan	2.427.237.815.833	1.653.956.944.914
4 2 1		Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	321.723.850.260	146.670.966.840
4 2 2		Dana Alokasi Umum	1.643.076.905.000	1.212.033.531.000
4 2 3		Dana Alokasi Khusus	462.437.060.573	295.252.447.074
4 3 3		Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	855.508.409.459	791.358.847.775
4 3 4		Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-
4 3 5		Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	42.105.411.927	200.042.779.458
4 3 6		Pendapatan Lain-Lain	-	-
5		Belanja Daerah	6.114.449.093.123	5.001.748.526.414
5 1		Belanja Tindak Langsung	3.051.934.162.853	2.403.121.658.450
5 1 1		Belanja Pegawai	2.537.507.730.878	2.245.987.148.767
5 1 2		Belanja Bunga	-	8.374.400
5 1 3		Belanja Subsidi	108.825.685.200	394.631.518
5 1 4		Belanja Hibah	402.404.804.575	68.503.996.486
5 1 5		Belanja Bantuan Sosial	-	86.051.251.000
5 1 6		Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintah	-	-
5 1 7		Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pe	1.520.608.500	1.305.838.500
5 1 8		Belanja Tidak Terduga	1.675.333.700	870.417.779
5 2		Belanja Langsung	3.062.514.930.270	2.598.626.867.964
5 2 1		Belanja Pegawai	-	-
5 2 2		Belanja Barang dan Jasa	2.012.818.706.647	1.818.530.456.166
5 2 3		Belanja Modal	1.049.696.223.623	780.096.411.798

LRA 2018

Ready



LAMPIRAN 5 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bandung Tahun 2019-2020



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR S.D. 31 DESEMBER 2020

	URAIAN	CTT.	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020 (Rp)	%	REALISASI 2019 (Rp)
1	<b>PENDAPATAN - LRA</b>					
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA</b>	5.1.4.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.1.4.1.a	1.751.231.714.893,00	1.629.188.481.446,00	93,03	2.154.637.871.057,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5.1.4.1.b	62.042.339.709,00	52.332.312.611,00	84,35	62.466.949.931,00
5	Pend. Hasil Pengelol. Kek. Daerah yg Dipisahkan - LRA	5.1.4.1.c	27.740.800.000,00	13.134.333.115,00	47,35	10.477.350.536,00
6	Lain-lain PAD yang Sah - LRA	5.1.4.1.d	423.799.239.446,25	369.128.646.563,92	87,10	320.676.818.751,00
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)		2.264.814.094.039,25	2.063.763.773.735,92	91,12	2.548.258.990.275,00
8						
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LRA</b>	5.1.4.2				
10	<b>TRANSFER PEM. PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>	5.1.4.2.a				
11	Dana Bagi Hasil Pajak - LRA		431.523.082.259,00	310.600.736.095,00	71,98	227.013.431.528,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LRA		44.555.505.011,00	38.564.780.199,00	86,55	21.766.339.676,00
13	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA		1.601.834.557.000,00	1.589.628.887.000,00	99,24	1.798.102.095.000,00
14	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA		490.964.244.479,00	457.498.929.083,00	93,18	437.199.095.336,00
15	Jml. Pend. Transfer D. Perimbangan (11 s/d 14)		2.568.877.388.749,00	2.396.293.332.377,00	93,28	2.484.080.961.540,00
16						
17	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA - LRA</b>	5.1.4.2.b				
18	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dana Penyesuaian		97.308.562.000,00	97.308.562.000,00	100,00	0,00
20	Jml. Pend. Transfer Pem. Pusat Lainnya (18 s/d 19)		97.308.562.000,00	97.308.562.000,00	100,00	0,00
21						
22	<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI - LRA</b>	5.1.4.2.c				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA		859.595.992.613,00	747.838.922.900,00	87,00	871.625.403.102,00
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LRA		0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jml. Pend. Transfer Pem. Provinsi (23 s/d 24)		859.595.992.613,00	747.838.922.900,00	87,00	871.625.403.102,00
26						
27	<b>BANTUAN KEUANGAN</b>					
28	Bantuan Keuangan dari Pemprov. Jawa Barat		132.629.731.290,00	110.823.563.376,00	83,56	270.435.589.719,00
29	Jml. Bantuan Keuangan Provinsi (28 s/d 28)		132.629.731.290,00	110.823.563.376,00	83,56	270.435.589.719,00
30	Total Pendapatan Transfer (15+20+25+29)		3.658.411.674.652,00	3.362.294.380.663,00	91,83	3.826.141.954.361,00
31						
32	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	5.1.4.3				
33	Pendapatan Hibah		228.245.064.074,00	227.914.134.070,00	99,86	207.418.000.000,00
34	Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
35	Jumlah Lain-2 Pend. yang Sah (33 s/d 34)		228.245.064.074,00	227.914.134.070,00	99,86	207.418.000.000,00
36	JUMLAH PENDAPATAN (7+30+35)		6.151.470.832.765,25	5.643.962.288.450,92	91,75	6.381.816.944.636,00
37						
38	<b>BELANJA</b>					
39	<b>BELANJA OPERASI</b>	5.1.4.4				
40	Belanja Pegawai		2.479.281.443.712,03	2.169.321.718.452,00	87,50	2.535.338.719.039,00
41	Belanja Barang		2.521.472.852.568,54	2.084.516.874.513,00	82,67	2.294.327.100.117,67
42	Belanja Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
43	Belanja Subsidi		140.153.204.134,00	139.153.204.134,00	99,29	108.825.685.200,00
44	Belanja Hibah		186.640.642.604,00	177.728.392.762,00	95,22	190.285.964.705,00
45	Belanja Bantuan Sosial		79.629.159.800,00	79.614.039.800,00	99,98	2.242.800.000,00
46	Jumlah Belanja Operasi (40 s.d. 45)		5.407.177.302.818,57	4.650.334.229.661,00	86,00	5.131.020.269.061,67
47						
48	<b>BELANJA MODAL</b>	5.1.4.5				
49	Belanja Tanah		21.821.167.520,00	20.865.964.000,00	95,82	54.784.174.000,00
50	Belanja Peralatan dan Mesin		408.291.527.930,41	353.811.845.854,00	86,86	597.169.086.478,00
51	Belanja Gedung dan Bangunan		78.935.998.332,87	51.119.717.927,00	64,76	264.128.358.116,00
52	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		153.855.538.412,36	126.734.813.432,00	82,37	226.320.905.438,00
53	Belanja Aset Tetap Lainnya		4.517.816.860,07	5.948.946.405,00	131,66	37.026.945.392,00
54	Jumlah Belanja Modal (49 s.d. 53)		667.422.048.855,71	588.480.367.618,00	88,38	1.179.429.469.424,00
55						
56	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	5.1.4.6				
57	Belanja Tak Terduga		272.400.405.234,00	165.205.114.775,00	60,65	197.529.875,00
58	Jumlah Belanja Tak Terduga (57 s.d. 57)		272.400.405.234,00	165.205.114.775,00	60,65	197.529.875,00
59	TOTAL BELANJA (46+54+58)		6.348.999.756.908,28	5.374.019.732.084,00	84,67	6.310.647.268.360,67
60						
61	<b>TRANSFER</b>	5.1.4.7				
62	<b>TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA</b>					
63	Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00	0,00	0,00
64	Bagi Hasil Retribusi		0,00	0,00	0,00	0,00
65	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
66	JUMLAH TRANSFER BH. KE DESA (63 s.d. 65)		0,00	0,00	0,00	0,00
67						



LAMPIRAN 6 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bandung Tahun  
2020-2021



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR S.D. 31 DESEMBER 2021

	URAIAN	CTT.	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp)	%	REALISASI 2020 (Rp)
1	PENDAPATAN - LRA					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	5.1.4.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.1.4.1.a	1.808.750.000.000,00	1.695.122.535.713,00	93,72	1.629.188.481.446,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5.1.4.1.b	69.506.809.600,00	30.092.035.919,00	43,29	52.332.312.611,00
5	Pend. Hasil Pengolol. Kek. Daerah yg Dipisahkan - LRA	5.1.4.1.c	18.885.582.468,00	15.777.448.799,00	83,54	13.134.333.115,00
6	Lain-lain PAD yang Sah - LRA	5.1.4.1.d	512.661.936.120,00	454.979.863.669,00	88,75	369.128.646.563,92
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)		2.409.804.328.188,00	2.195.971.864.100,00	91,13	2.063.783.773.735,92
8						
9	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	5.1.4.2				
10	TRANSFER PEM. PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.1.4.2.a				
11	Dana Bagi Hasil Pajak - LRA		326.596.211.902,00	379.502.532.540,00	116,20	310.600.736.095,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LRA		27.575.499.648,00	47.498.864.840,00	172,25	38.564.780.199,00
13	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA		1.566.037.358.000,00	1.566.037.358.000,00	100,00	1.589.628.887.000,00
14	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA		490.821.642.000,00	415.031.646.311,00	84,56	457.498.929.083,00
15	Jml. Pend. Transfer D. Perimbangan (11 s/d 14)		2.411.030.711.550,00	2.408.070.401.691,00	99,88	2.396.293.332.377,00
16						
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA - LRA	5.1.4.2.b				
18	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dana Penyesuaian		48.660.924.000,00	48.660.924.000,00	100,00	97.308.562.000,00
20	Jml. Pend. Transfer Pem. Pusat Lainnya (18 s/d 19)		48.660.924.000,00	48.660.924.000,00	100,00	97.308.562.000,00
21						
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI - LRA	5.1.4.2.c				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA		866.232.273.732,00	842.981.759.548,00	97,32	747.838.922.900,00
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LRA		0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jml. Pend. Transfer Pem. Provinsi (23 s/d 24)		866.232.273.732,00	842.981.759.548,00	97,32	747.838.922.900,00
26						
27	BANTUAN KEUANGAN					
28	Bantuan Keuangan dari Pemprov. Jawa Barat		119.141.804.576,00	118.051.397.224,00	99,08	110.823.563.376,00
29	Jml. Bantuan Keuangan Provinsi (28 s/d 28)		119.141.804.576,00	118.051.397.224,00	99,08	110.823.563.376,00
30	Total Pendapatan Transfer (15+20+25+29)		3.445.065.713.858,00	3.417.764.482.463,00	99,21	3.352.264.380.653,00
31						
32	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.4.3				
33	Pendapatan Hibah		10.200.000.000,00	6.000.000.000,00	58,82	227.914.134.070,00
34	Pendapatan Lainnya		219.780.489.411,00	218.508.564.832,00	0,00	0,00
35	Jumlah Lain-2 Pend. yang Sah (33 s/d 34)		229.980.489.411,00	224.508.564.832,00	97,62	227.914.134.070,00
36	JUMLAH PENDAPATAN (7+30+35)		6.084.850.531.457,00	5.838.244.931.395,00	95,95	5.643.962.288.458,92
37						
38	BELANJA					
39	BELANJA OPERASI	5.1.4.4				
40	Belanja Pegawai		2.495.454.285.605,00	2.236.008.671.238,00	89,60	2.169.321.718.452,00
41	Belanja Barang		2.706.869.500.783,00	2.296.416.699.844,20	84,84	2.084.516.874.513,00
42	Belanja Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
43	Belanja Subsidi		79.943.159.300,00	79.943.159.300,00	100,00	139.153.204.134,00
44	Belanja Hibah		185.539.678.000,00	173.726.654.636,00	93,63	177.728.392.762,00
45	Belanja Bantuan Sosial		56.665.000.000,00	55.502.500.000,00	97,96	79.814.039.800,00
46	Jumlah Belanja Operasi (40 s.d. 45)		5.524.471.623.688,00	4.841.595.685.018,20	87,64	4.650.334.229.661,00
47						
48	BELANJA MODAL	5.1.4.5				
49	Belanja Tanah		42.502.304.748,00	40.727.272.200,00	95,82	20.865.064.000,00
50	Belanja Peralatan dan Mesin		409.752.657.637,00	350.895.360.806,00	85,64	353.811.845.854,00
51	Belanja Gedung dan Bangunan		210.330.374.072,00	163.103.652.039,00	77,06	51.119.717.927,00
52	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		119.533.700.418,00	104.818.394.157,00	87,69	126.734.813.432,00
53	Belanja Aset Tetap Lainnya		49.094.783.824,00	42.021.745.591,00	85,59	5.948.946.405,00
54	Jumlah Belanja Modal (49 s.d. 53)		831.214.020.699,00	721.566.424.793,00	86,81	558.480.387.618,00
55						
56	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.4.6				
57	Belanja Tak Terduga		135.945.380.581,00	83.645.010.827,00	61,53	165.205.114.775,00
58	Jumlah Belanja Tak Terduga (57 s.d. 57)		135.945.380.581,00	83.645.010.827,00	61,53	165.205.114.775,00
59	TOTAL BELANJA (46+54+58)		6.491.631.024.988,00	5.646.807.129.638,20	86,99	5.374.019.732.954,00
60						
61	TRANSFER	5.1.4.7				
62	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA					
63	Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00	0,00	0,00
64	Bagi Hasil Retribusi		0,00	0,00	0,00	0,00
65	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
66	JUMLAH TRANSFER BH. KE DESA (63 s.d. 65)		0,00	0,00	0,00	0,00



LAMPIRAN 7 Tabel Uji-T

Pr	0,25	0,10	0,05	0,025	0,01	0,005	0,001
df	0,50	0,20	0,10	0,050	0,02	0,010	0,002
1	1,00000	3,07768	6,31375	12,70620	31,82052	63,65674	318,30884
2	0,81650	1,88562	2,91999	4,30265	6,96456	9,92484	22,32712
3	0,76489	1,63774	2,35336	3,18245	4,54070	5,84091	10,21453
4	0,74070	1,53321	2,13185	2,77645	3,74695	4,60409	7,17318
5	0,72669	1,47588	2,01505	2,57058	3,36493	4,03214	5,89343
6	0,71756	1,43976	1,94318	2,44691	3,14267	3,70743	5,20763
7	0,71114	1,41492	1,89458	2,36462	2,99795	3,49948	4,78529
8	0,70639	1,39682	1,85955	2,30600	2,89646	3,35539	4,50079
9	0,70272	1,38303	1,83311	2,26216	2,82144	3,24984	4,29681
10	0,69981	1,37218	1,81246	2,22814	2,76377	3,16927	4,14370
11	0,69745	1,36343	1,79588	2,20099	2,71808	3,10581	4,02470
12	0,69548	1,35622	1,78229	2,17881	2,68100	3,05454	3,92963
13	0,69383	1,35017	1,77093	2,16037	2,65031	3,01228	3,85198
14	0,69242	1,34503	1,76131	2,14479	2,62449	2,97684	3,78739
15	0,69120	1,34061	1,75305	2,13145	2,60248	2,94671	3,73283
16	0,69013	1,33676	1,74588	2,11991	2,58349	2,92078	3,68615
17	0,68920	1,33338	1,73961	2,10982	2,56693	2,89823	3,64577
18	0,68836	1,33039	1,73406	2,10092	2,55238	2,87844	3,61048
19	0,68762	1,32773	1,72913	2,09302	2,53948	2,86093	3,57940
20	0,68695	1,32534	1,72472	2,08596	2,52798	2,84534	3,55181
21	0,68635	1,32319	1,72074	2,07961	2,51765	2,83136	3,52715
22	0,68581	1,32124	1,71714	2,07387	2,50832	2,81876	3,50499
23	0,68531	1,31946	1,71387	2,06866	2,49987	2,80734	3,48496
24	0,68485	1,31784	1,71088	2,06390	2,49216	2,79694	3,46678
25	0,68443	1,31635	1,70814	2,05954	2,48511	2,78744	3,45019
26	0,68404	1,31497	1,70562	2,05553	2,47863	2,77871	3,43500
27	0,68368	1,31370	1,70329	2,05183	2,47266	2,77068	3,42103
28	0,68335	1,31253	1,70113	2,04841	2,46714	2,76326	3,40816
29	0,68304	1,31143	1,69913	2,04523	2,46202	2,75639	3,39624
30	0,68276	1,31042	1,69726	2,04227	2,45726	2,75000	3,38518

LAMPIRAN 8 Tabel Uji-F

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242
2	18,51	19,00	19,16	19,25	19,30	19,33	19,35	19,37	19,38	19,40
3	10,13	9,55	9,28	9,12	9,01	8,94	8,89	8,85	8,81	8,79
4	7,71	6,94	6,59	6,39	6,26	6,16	6,09	6,04	6,00	5,96
5	6,61	5,79	5,41	5,19	5,05	4,95	4,88	4,82	4,77	4,74
6	5,99	5,14	4,76	4,53	4,39	4,28	4,21	4,15	4,10	4,06
7	5,59	4,74	4,35	4,12	3,97	3,87	3,79	3,73	3,68	3,64
8	5,32	4,46	4,07	3,84	3,69	3,58	3,50	3,44	3,39	3,35
9	5,12	4,26	3,86	3,63	3,48	3,37	3,29	3,23	3,18	3,14
10	4,96	4,10	3,71	3,48	3,33	3,22	3,14	3,07	3,02	2,98
11	4,84	3,98	3,59	3,36	3,20	3,09	3,01	2,95	2,90	2,85
12	4,75	3,89	3,49	3,26	3,11	3,00	2,91	2,85	2,80	2,75
13	4,67	3,81	3,41	3,18	3,03	2,92	2,83	2,77	2,71	2,67
14	4,60	3,74	3,34	3,11	2,96	2,85	2,76	2,70	2,65	2,60
15	4,54	3,68	3,29	3,06	2,90	2,79	2,71	2,64	2,59	2,54
16	4,49	3,63	3,24	3,01	2,85	2,74	2,66	2,59	2,54	2,49
17	4,45	3,59	3,20	2,96	2,81	2,70	2,61	2,55	2,49	2,45
18	4,41	3,55	3,16	2,93	2,77	2,66	2,58	2,51	2,46	2,41
19	4,38	3,52	3,13	2,90	2,74	2,63	2,54	2,48	2,42	2,38
20	4,35	3,49	3,10	2,87	2,71	2,60	2,51	2,45	2,39	2,35
21	4,32	3,47	3,07	2,84	2,68	2,57	2,49	2,42	2,37	2,32
22	4,30	3,44	3,05	2,82	2,66	2,55	2,46	2,40	2,34	2,30
23	4,28	3,42	3,03	2,80	2,64	2,53	2,44	2,37	2,32	2,27
24	4,26	3,40	3,01	2,78	2,62	2,51	2,42	2,36	2,30	2,25
25	4,24	3,39	2,99	2,76	2,60	2,49	2,40	2,34	2,28	2,24
26	4,23	3,37	2,98	2,74	2,59	2,47	2,39	2,32	2,27	2,22
27	4,21	3,35	2,96	2,73	2,57	2,46	2,37	2,31	2,25	2,20
28	4,20	3,34	2,95	2,71	2,56	2,45	2,36	2,29	2,24	2,19
29	4,18	3,33	2,93	2,70	2,55	2,43	2,35	2,28	2,22	2,18
30	4,17	3,32	2,92	2,69	2,53	2,42	2,33	2,27	2,21	2,16
31	4,16	3,30	2,91	2,68	2,52	2,41	2,32	2,25	2,20	2,15
32	4,15	3,29	2,90	2,67	2,51	2,40	2,31	2,24	2,19	2,14
33	4,14	3,28	2,89	2,66	2,50	2,39	2,30	2,23	2,18	2,13
34	4,13	3,28	2,88	2,65	2,49	2,38	2,29	2,23	2,17	2,12
35	4,12	3,27	2,87	2,64	2,49	2,37	2,29	2,22	2,16	2,11
36	4,11	3,26	2,87	2,63	2,48	2,36	2,28	2,21	2,15	2,11
37	4,11	3,25	2,86	2,63	2,47	2,36	2,27	2,20	2,14	2,10
38	4,10	3,24	2,85	2,62	2,46	2,35	2,26	2,19	2,14	2,09
39	4,09	3,24	2,85	2,61	2,46	2,34	2,26	2,19	2,13	2,08
40	4,08	3,23	2,84	2,61	2,45	2,34	2,25	2,18	2,12	2,08